

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANK SAMPAH DALAM MENDUKUNG
UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI
KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh :

RIA REZKI SAFITRI

4518021069

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Ria Rezki Safitri

Nomor Stambuk : 4518021069

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

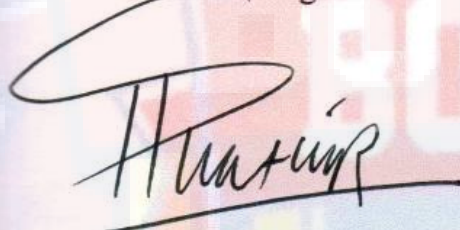
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, Februari 2023

Menyetujui ;

Pembimbing I



Drs. Natsir Tompo, M.Si
NIDN. 0901065901

Pembimbing II



Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si
NIDN. 09 1509 8603

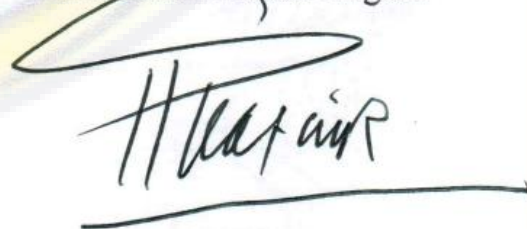
Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar



Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Drs. Natsir Tompo, M.Si
NIDN. 0901065901

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Kamis Tanggal 02 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar**

Nama : **Ria Rezki Safitri**
Nomor Stambuk : **4518021069**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Makassar, 02 Februari 2023

Pengawas Umum:


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si

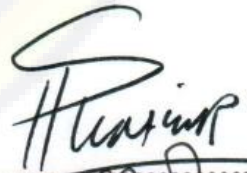
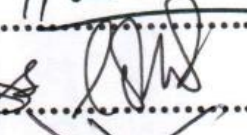

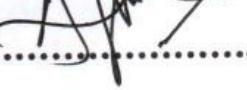
Panitia Ujian :


Drs. Natsir Tompo, M.Si
Ketua


Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si ✍
Sekretaris

Tim Penguji :

1. Drs Natsir Tompo, M.Si
2. Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si
3. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd
4. Dr. Ali Anas, S.Sos.,M.Si


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ria Rezki Safitri
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung
Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di
Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan orang lain, baik Sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (penelitian sebelumnya dan jurnal terdahulu) ini dikutip atau rujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Makassar, 02 Februari 2023

Penulis



Ria Rezki Safitri
4518021069

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga proses pembuatan proposal penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar” dapat penulis laksanakan dengan baik. Proposal penelitian ini penulis susun sebagai syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu bijaksana memberikan nasehat dan arahan dalam menyusun skripsi ini.
3. Drs. Natsir Tompo, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa sekaligus Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Segenap bapak dan ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
5. Orang tua penulis yaitu Sangkala (alm) dan Karmila yang selalu menjadi penyemangat agar dapat menyelesaikan studi.
6. Saudara-saudara dan seluruh keluarga atas doa, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.
7. Suami penulis yaitu Ismail S.Kom yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga bisa sampai ditahap ini.
8. Anak-anakku tersayang yaitu Tsamara Ayskaa Zaina dan Zhafran Abizar Zain yang selalu menjadi penyemangat untuk penulis dalam melaksanakan studi.
9. Saudara-saudari Prodi Administrasi Negara Angkatan 18.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semogaskripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Makassar, Februari 2023
Penulis

Ria Rezki Safitri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Implementasi Kebijakan Publik	9
1. Definisi Implementasi Kebijakan Publik	9
2. Proses Implementasi Kebijakan	10
3. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik	11
a. Model Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn	11

b.	Model Implementasi Kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier	15
c.	Model Implementasi Kebijakan dari Hogwood dan Gunn	18
d.	Model Implementasi Kebijakan dari Gogging, Bowman dan Lester.....	21
e.	Model Implementasi Kebijakan dari Edward III.....	21
f.	Model Implementasi Kebijakan dari Merilee S. Grindle.....	23
4.	Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan.....	24
B.	Tinjauan Sampah.....	25
1.	Definisi Sampah.....	25
2.	Jenis-Jenis Sampah	26
3.	Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat.....	28
C.	Tinjauan Umum Bank Sampah	29
1.	Konsep Bank Sampah.....	29
2.	Manajemen Bank Sampah	30
D.	Penelitian Terdahulu	32
E.	Kerangka Konsep	34
BAB III METODE PENELITIAN		37
A.	Bentuk Penelitian	37
B.	Lokasi Penelitian	38

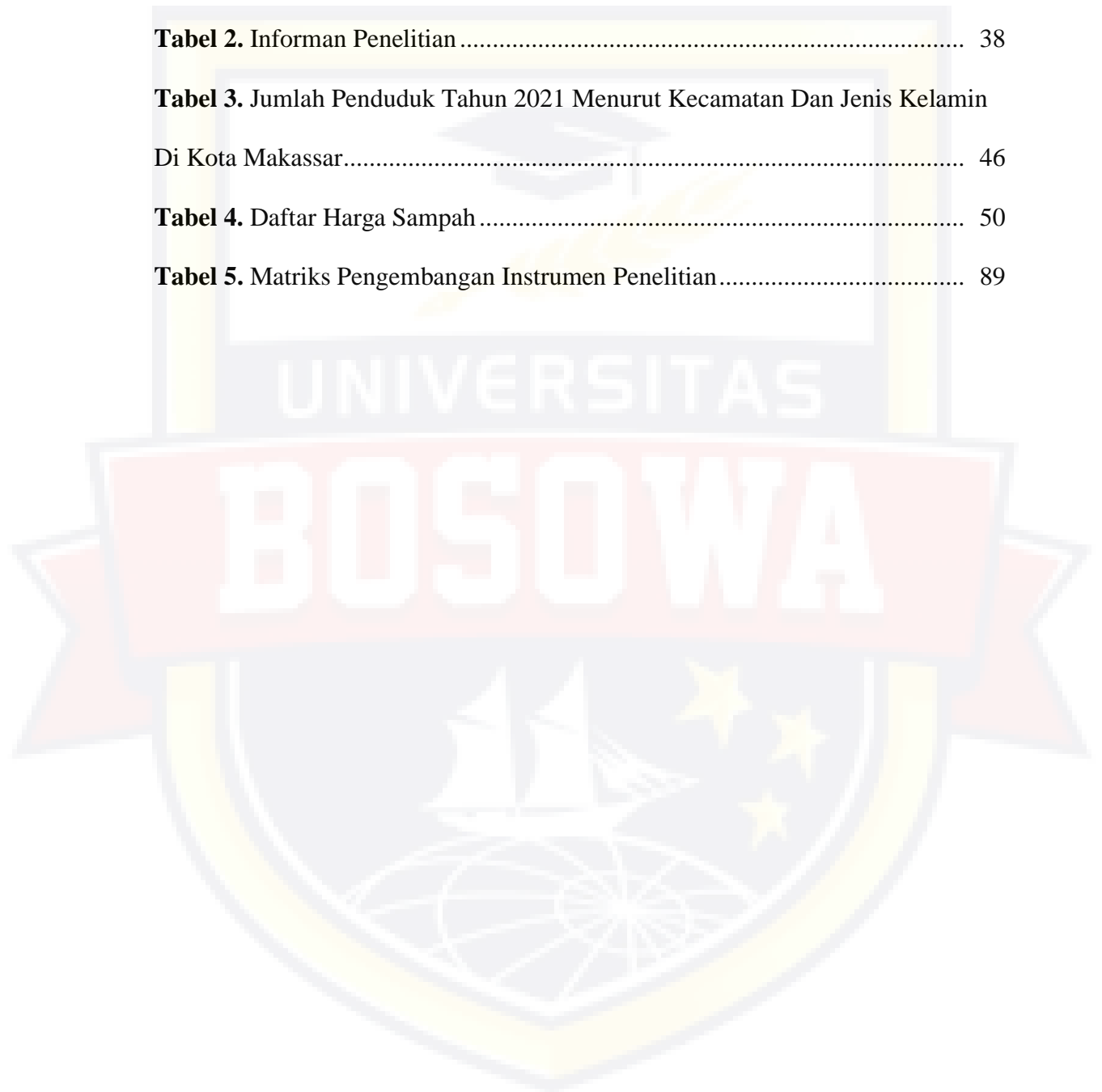
C.	Informan Penelitian	38
D.	Sumber Data	39
E.	Teknik Pengumpulan Data	40
F.	Teknik Pengabsahan Data	41
G.	Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		44
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	44
1.	Gambaran Umum Kota Makassar.....	44
2.	Gambaran Umum Kecamatan Panakkukang	46
3.	Gambaran Umum UPT Bank Sampah Pusat	47
B.	Analisis Implementasi Program Bank Sampah Pusat Di Kecamatan Panakkukang	52
C.	Faktor-Faktor yang mempengaruhi berjalannya Implementasi Kebijakan Bank Sampah Di Kecamatan Panakkukang.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		81
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Teori Van Meter dan Van Horn.....	14
Gambar 2. Variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi	15
Gambar 3. Faktor penentu implmentasi menurut Edward III.....	23
Gambar 4. Implementasi sebagai proses politik dan administrasi.....	24
Gambar 5. Kerangka Pikir.....	36
Gambar 6. UPT Bank Sampah Pusat.....	94
Gambar 7. Buku Tabungan Nasabah.....	95
Gambar 8. Petugas Bank Sampah Unit Sedang Melakukan Pemilahan Sampah.....	96
Gambar 9. Mesin Pencacah Kaca.....	97
Gambar 10. Mesin Press Kaca.....	98
Gambar 11. Kendaraan Pengangkut Sampah	99
Gambar 12. Penjemputan Sampah Oleh Petugas Bank Sampah Pusat	100
Gambar 13. Mekanisme Penimbangan Sampah Di Bank Sampah Unit.....	101
Gambar 14. Mekanisme Penimbangan Sampah Di Bank Sampah Pusat.....	102
Gambar 15. Tempat Pemilahan Sampah Di Bank Sampah Pusat	103
Gambar 16. Tempat Pemilahan Sampah Di Bank Sampah Unit.....	104
Gambar 17. Tempat Pemilahan Sampah Di Bank Sampah Unit.....	105

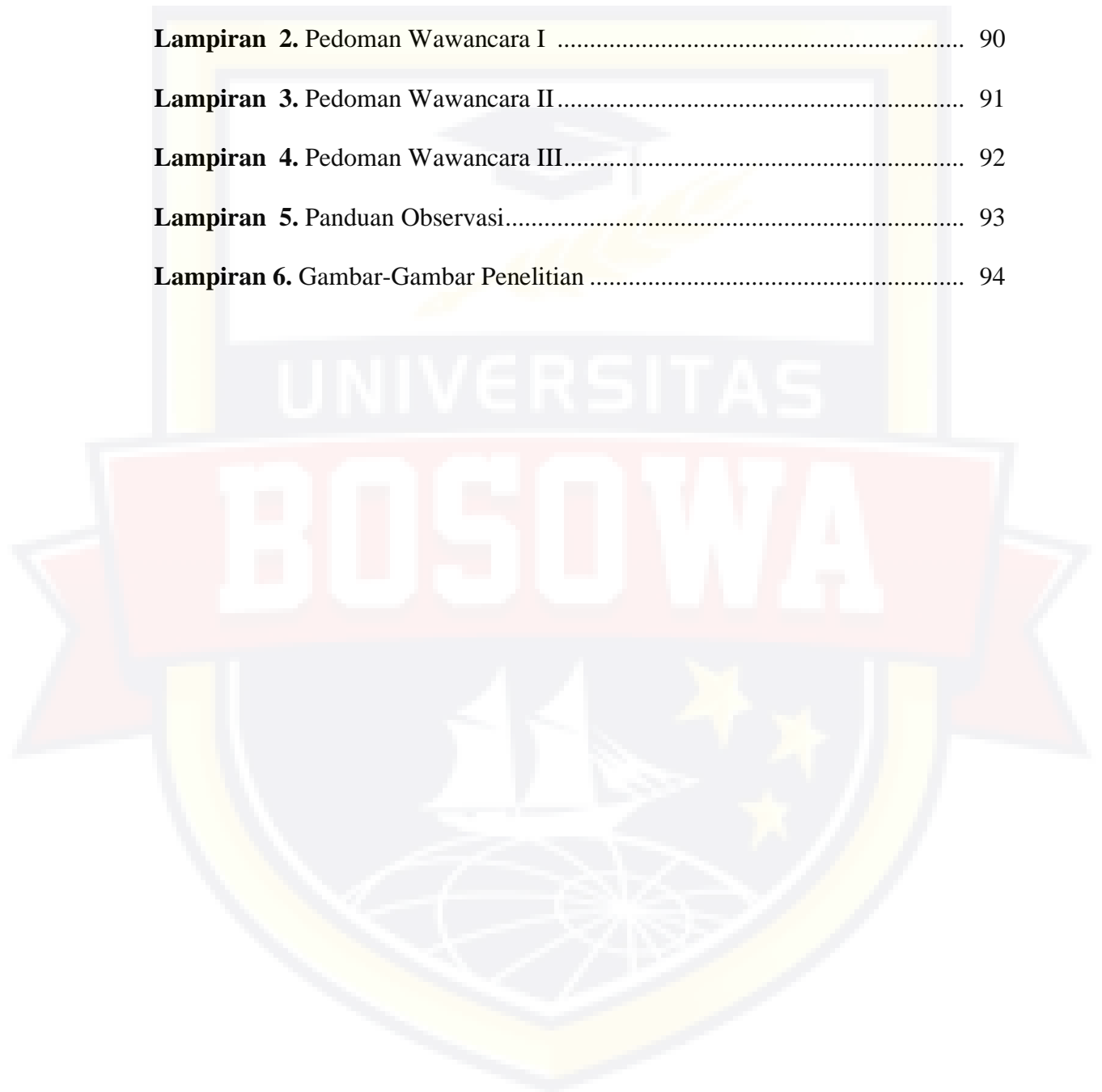
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian terdahulu.....	32
Tabel 2. Informan Penelitian	38
Tabel 3. Jumlah Penduduk Tahun 2021 Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Di Kota Makassar.....	46
Tabel 4. Daftar Harga Sampah.....	50
Tabel 5. Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian.....	89



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Pengembangan Instrument Penelitian	89
Lampiran 2. Pedoman Wawancara I	90
Lampiran 3. Pedoman Wawancara II.....	91
Lampiran 4. Pedoman Wawancara III.....	92
Lampiran 5. Panduan Observasi.....	93
Lampiran 6. Gambar-Gambar Penelitian	94



ABSTRAK

Meningkatnya permasalahan sampah di Kota Makassar menyebabkan diterapkannya kebijakan Bank Sampah sesuai Peraturan Walikota No. 63 Tahun 2014 tentang pembentukan UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah Kota Makassar. Sebagai hasil dari undang-undang ini, diharapkan warga akan menghasilkan lebih sedikit sampah secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mencoba memperhatikan realita yang terjadi di lapangan digunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Wawancara, dokumentasi, dan catatan tertulis lainnya digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Untuk menilai keberhasilan kebijakan Bank Sampah di Kecamatan Panakkukang, penulis mengacu pada pendapat George C. Edwards III. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terjadi sudah bagus, sumber daya yang tersedia juga sudah bagus walau belum maksimal, disposisi memegang peranan penting dalam berlangsungnya implementasi kebijakan ini dan struktur birokrasi yang ada juga sudah baik. Beberapa rekomendasi penulis antara lain sosialisasikan lebih giat lagi untuk diadakan, mengkoordinasikan upaya dengan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengatasi hambatan dalam penyediaan infrastruktur, dan berkonsentrasi tidak hanya pada pembuangan sampah tetapi juga cara untuk mendaur ulang.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Bank Sampah, Bank Sampah Pusat Kota Makassar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Hasil Sensus Penduduk September 2020 (SP2020) mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk SP2020 meningkat 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP2010. Laju pertumbuhan penduduk per tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25 persen (Statistik, 2020).

Pertumbuhan penduduk akan mengurangi kemampuan sumber daya alam terbarukan (seperti air dan udara) untuk menyerap limbah dari aktivitas manusia. Peningkatan jumlah penduduk juga akan meningkatkan volume sampah yang dihasilkan terutama di kota-kota besar Indonesia.

Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan juga merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Makassar adalah kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Indonesia bagian timur. Berdasarkan sumber dari (Perkotaan, 2017) luas wilayah Kota Makassar adalah 175.77 Km² dan jumlah penduduk menurut Badan Pusat Statistik sebanyak 1.423.877 jiwa pada tahun 2020 (B. P. S. K. Makassar, 2020). Dengan jumlah tersebut maka tidak heran jika angka produksi dan konsumsi di kota Makassar juga tinggi. Hal ini juga yang menyebabkan produksi sampah di Kota Makassar terus meningkat setiap tahunnya. Data yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

menyebutkan bahwa pada tahun 2020, jumlah sampah harian di Kota Makassar yaitu 1.023,71 ton dan timbulan sampah pertahun 373.653,93 ton (SIPSN, 2020).

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, volume sampah di Makassar adalah 7.374,5 ton per bulan dan 245,8 ton per hari. Potensi sampah kota Makassar tahun 2021 adalah 410.291 ton dan dalam satu hari mencapai 1.139 ton (Merdeka, 2021).

Menurut *World Health Organization* (WHO), sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disukai, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari aktivitas manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengertian sampah adalah sisa-sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah N0.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dijelaskan kembali tentang pengertian sampah rumah tangga sebagai sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah yang tidak termasuk tinja dan sampah tertentu.

Perlu penanganan serius untuk mengatasi produksi sampah yang besar. Karena sampah merupakan salah satu penyebab pencemaran lingkungan yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan. Pengelolaan sampah yang selama ini dilakukan secara konvensional adalah pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pembuangan limbah campuran dapat merusak dan mengurangi nilai bahan yang dapat digunakan kembali. Bahan organik dapat mencemari/mengkontaminasi

bahan yang dapat didaur ulang dan racun dapat mengganggu penggunaannya. Hal tersulit dalam proses pengelolaan sampah adalah mengubah paradigma masyarakat yang sebelumnya hanya mengumpulkan, mengangkut dan membuang sampah, beralih ke pengelolaan sampah yang menerapkan prinsip 3R (*reuse, reduce, recycle*) melalui proses yang cerdas dan efisien dan upaya terjadwal.

Pemahaman masyarakat Indonesia akan pentingnya daur ulang sampah masih perlu ditingkatkan. Produk rusak, produk yang tidak terpakai, kemasan produk, dan sisa makanan yang dibuang sebagian menumpuk di tempat pembuangan sampah, dan sisanya berserakan di jalan atau mengambang di sungai.

Mengingat kesadaran kolektif masyarakat dan penciptaan lingkungan bersih saling terkait, maka penting untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Hal ini karena kesadaran kolektif masyarakat menciptakan lingkungan bersih jangka panjang. Tak heran, rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan di masyarakat menjadikan masalah sampah menjadi masalah global dan belum terselesaikan di hampir setiap kota di Indonesia.

Untuk mengatasi masalah sampah ini, pemerintah perlu menerapkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, mengingat produksi sampah setiap hari akan meningkat dan kontribusi sampah terbesar akan datang dari rumah tangga masyarakat. Masalah pengelolaan sampah sangat serius di perkotaan karena kompleksitas masalah dan kepadatan penduduk yang tinggi, dan seringkali prioritas diberikan pada pengelolaan sampah di perkotaan. Lebih lanjut, pengolahan sampah di Indonesia merupakan masalah perkotaan yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah (Pratiwi, 2018).

Sudah saatnya meninggalkan model pembuangan sampah di TPA. Gaya hidup masyarakat yang membuang sampah dan menganggapnya tidak bernilai ekonomi harus diganti dengan model baru. Paradigma baru yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya sebagai energi, kompos, pupuk atau bahan baku industri.

Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab dan wewenang dari pemerintah, pemerintah daerah dan peran masyarakat agar sampah dapat dikelola secara proporsional, efektif dan efisien. Pemerintah menetapkan mekanisme pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 20 Ayat (1) tentang Pengelolaan Sampah dengan konsep 3R *Reduce* : pengurangan sampah, *Reuse* : mengurangi penumpukan sampah, *Recycle* : daur ulang sampah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Bank Sampah, Bank Sampah adalah sarana pengelolaan sampah yang sesuai dengan prinsip 3R (*Reduce*, *Reuse*, *Recycle*) sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan penerapan ekonomi sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Bank sampah merupakan salah satu metode dalam Gerakan Nasional Kebersihan yang kini dicanangkan oleh pemerintah.

Di Kota Makassar sendiri kebijakan Bank Sampah ini ditindaklanjuti dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Makassar No. 63 Tahun 2014 tentang

pembentukan UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah Kota Makassar. UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah adalah UPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan Perwali kota Makassar No. 63 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014, yang bertindak sebagai Bank Sampah Pusat Kota Makassar.

Bank Sampah Pusat merupakan instansi daerah yang diberdayakan untuk memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan Bank Sampah Unit (BSU) di kota Makassar yang kemudian menjadi mitra UPT Bank Sampah Pusat dalam pengelolaan sampah dengan menerapkan sistem 3R dan pembuatan sampah memiliki nilai ekonomis (Fatmawati et al., 2019). Bank Sampah Unit ini dikelola oleh masyarakat baik di tingkat RW/RT maupun di tingkat Kelurahan. Di BSU ini sampah dikumpulkan dan dipilah menurut jenisnya dan dikelola dengan sistem seperti perbankan dengan memberikan buku tabungan kepada nasabah. Sampah yang berhasil dikumpulkan oleh masyarakat akan ditimbang dan diberi imbalan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pengelola BSU. Hasil dari pengumpulan sampah di BSU kemudian dijual ke UPT Bank Sampah Pusat Kota Makassar. Bank Sentral membawahi Unit Bank Sampah (BSU) yang berada di 15 kecamatan di Kota Makassar. Bank Sampah Pusat Kota Makassar berada di Jl. Toddopuli Raya, Pandang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar.

Kegiatan sistem Bank Sampah dilakukan oleh, melalui dan untuk masyarakat. Seperti bank konvensional pada umumnya, bank sampah memiliki sistem pengelolaan yang operasionalnya dilakukan oleh masyarakat sendiri.

Hingga tahun 2021 telah dibentuk 638 Bank Sampah Unit (BSU) yang tersebar di 15 kecamatan di Kota Makassar. Namun dalam proses perjalanannya sampai tahun 2021, yang mampu bertahan dan aktif hanya sekitar 55% atau 352 Bank Sampah Unit (BSU) serta tidak lebih dari setengah jumlah bank sampah yang memiliki kinerja yang baik (Hermansyah, 2021). Banyaknya Bank Sampah yang memiliki kinerja yang kurang baik mengakibatkan volume sampah yang direduksi masih sangat rendah, dimana pada tahun 2017 sampai 2019 sampah yang bisa direduksi hanya mencapai rata-rata 0,42%. Sampah yang direduksi sebanyak 0,42% masih sangat jauh dari target nasional, dimana pada tahun 2018 sebesar 15% dan tahun 2025 sebesar 30% (Fatmawati et al., 2019).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, peneliti menemukan adanya permasalahan yang terjadi pada Bank Sampah Kota Makassar, yaitu :

1. Terkait dengan komunikasi, masih ada warga yang tidak mengetahui tentang program Bank Sampah ini. Seperti Pak Irham warga Toddopuli I ini mengaku tidak tahu tentang adanya program Bank Sampah ini.
2. Terkait dengan sumber daya yaitu minimnya sarana dan prasarana, ada 2 pihak dalam infrastruktur ini, yaitu infrastruktur milik UPT BSP dan infrastruktur milik BSU. Batasan lahan di BSP hanya sekitar 300 m² dimana lahan ini digunakan untuk perkantoran dan juga tempat untuk melakukan kegiatan pengolahan sampah. Selain itu, juga tidak ada mesin pencacah plastik dan mesin pencacah kertas.
3. Persoalan Disposisi atau karakter dari implementor. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengurus BSU yakni pak Agus, beliau

mengatakan memiliki nasabah 108 orang namun yang aktif hanya 30 orang saja. Hal ini dikarenakan warga beranggapan sampah rumah tangga yang mereka hasilkan hanya sedikit jadi tidak perlu dipilah untuk kemudian dijual kepada BSU.

4. Terkait dengan Struktur Birokrasi yaitu SOP yang ada di Bank Sampah Pusat masih memakai sistem pencatatan administrasi dengan cara manual atau melalui pembukuan. Data-data BSU yang menjadi mitra Bank Sampah Pusat masih ditulis manual begitupun data-data BSU yang akan dijemput sampah-sampahnya.

Permasalahan yang terjadi sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Edward III. Sebagaimana dikemukakan Edward III, ada empat variabel yang saling terkait dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji analisis implementasi program bank sampah dan faktor-faktor atau variabel yang mempengaruhi berjalannya program ini. Indikator yang akan digunakan untuk mengukur analisis implementasi pelaksanaan program bank sampah di kota Makassar adalah teori Edward III yang terkait dengan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Untuk mengetahui faktor atau variabel yang mempengaruhi berfungsinya program bank sampah, peneliti akan melakukan wawancara dan observasi.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung

Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis menentukan perumusan masalah dalam penelitian ini, yakni

- a. Bagaimana analisis implementasi program Bank Sampah di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar?
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan Bank Sampah di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui analisis implementasi pada program Bank Sampah di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan Bank Sampah di Kecamatan Panakkukang kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan Publik

1. Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Lester dan Stewart dijelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum yang didalamnya terdapat berbagai aktor dan organisasi yang bekerjasama dengan menggunakan prosedur atau teknik guna menjalankan kebijakan agar mencapai tujuan yang diinginkan (Krishnawan & Tuswoyo, 2022).

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah hasil yang didapatkan setelah ditetapkannya undang-undang yang memberikan otoritas, program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran dari hasil yang nyata (Setiawati, Sri, 2018).

Implementasi kebijakan merupakan fase penting dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus dilaksanakan untuk mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan secara luas dilihat sebagai alat administrasi publik di mana aktor, organisasi, proses, teknik, dan sumber daya diorganisasikan bersama untuk mengimplementasikan kebijakan guna mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan. (Sore & Sobirin, 2017)

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sampai tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya, implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan di mana tujuan dan dampak kebijakan dapat dihasilkan.

2. Proses Implementasi Kebijakan

Berikut ini adalah proses implementasi kebijakan publik menurut Michael Howlet dan M. Ramesh (Subarsono, 2021)

a. Penyusunan Agenda (*agenda setting*)

Penyusunan agenda adalah suatu proses dimana agar suatu masalah mendapatkan perhatian dari pemerintah.

b. Formulasi Kebijakan (*policy formulation*)

Formulasi kebijakan adalah proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.

c. Pembuatan Kebijakan (*decision making*)

Pembuatan kebijakan adalah suatu proses penentuan oleh pemerintah untuk memilih melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

d. Implementasi Kebijakan (*policy implementation*)

Implementasi kebijakan adalah proses untuk melaksanakan suatu kebijakan guna mencapai hasil yang dikehendaki.

e. Evaluasi Kebijakan (*policy evaluation*)

Evaluasi kebijakan adalah proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

3. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

a. Model Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan van Horn

Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan linier dari kebijakan publik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Model yang ditawarkan Van Meter dan Van Horn memiliki 6 (enam) variabel yang menjadi penghubung antara kebijakan dan kinerja (*performance*). Variabel-variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut (Pratiwi, 2018) :

1. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Variabel ini tergantung pada pentingnya sistem yang menentukan pencapaian kebijakan. Pencapaian ini menilai sejauh mana langkah-langkah kunci dan tujuan kebijakan terpenuhi.

2. Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber kebijakan perlu diperhatikan karena mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber ini termasuk dana atau insentif lain untuk mendorong dan memfasilitasi implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan (komunikasi)

Komunikasi di dalam dan di antara organisasi adalah proses yang kompleks dan sulit. Dengan menyampaikan pesan ke satu organisasi atau dari satu organisasi ke organisasi lain, komunikator dapat dengan sengaja atau tidak sengaja menyimpan dan menyampaikan pesan. Selain itu, para pelaksana menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam mengimplementasikan target kebijakan ketika sumber data yang berbeda memberikan interpretasi yang bertentangan dari pengukuran dan target dasar, atau ketika sumber yang sama memberikan interpretasi yang bertentangan.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Van Meter dan van Horn memperkenalkan beberapa elemen yang dapat mempengaruhi organisasi dalam menerapkan kebijakan: (1) kompetensi dan ukuran staff lembaga, (2) tingkat pengawasan hierarkis atas keputusan dan operasi sub-unit di lembaga pelaksana, (3) sumber daya politik suatu organisasi (misalnya dukungan antara anggota legislatif dan eksekutif), (4) revitalisasi organisasi, (5) tingkat komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan bisnis. Komunikasi vertikal relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu di luar organisasi, (6)

Hubungan formal dan informal lembaga dengan badan “pengambil keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Para peminat perbandingan Administrasi Negara dan kebijakan publik sangat tertarik untuk mengidentifikasi dampak variabel lingkungan pada hasil kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, dampak dari sistem ini pada pelaksanaan keputusan kebijakan telah mendapat sedikit perhatian, tetapi sistem ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada kinerja lembaga penegak.

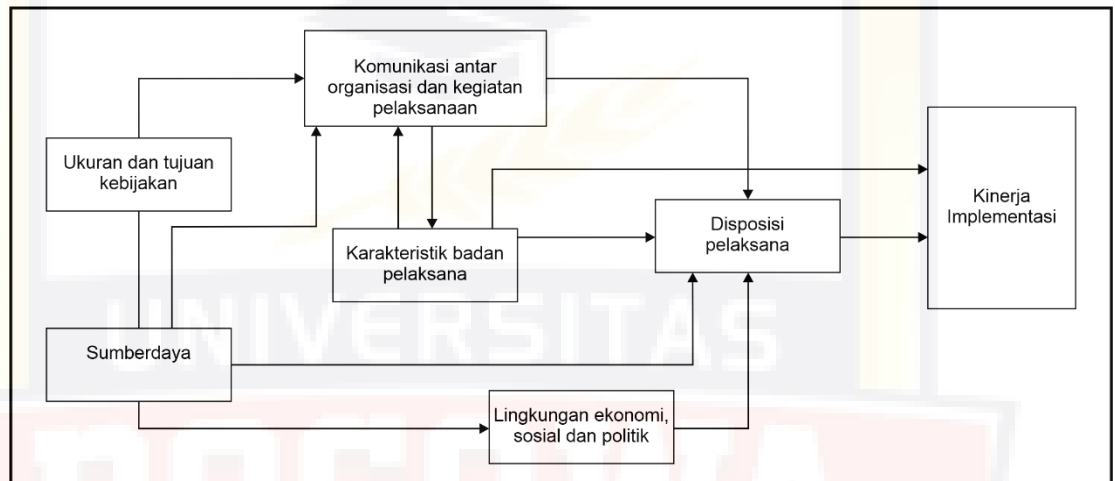
6. Disposisi (sikap para pelaksana)

Pada tahap ini, pengalaman subjektif individu memegang peranan yang sangat besar. Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi tiga faktor untuk mengimplementasikan tanggapan yang dapat mempengaruhi kemampuan dan keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan, yaitu : respon.

Pada tahap ini pengalaman-pengalaman subjektifitas individu-individu memegang peranan yang sangat besar. Van Meter dan Van Horn mengidentifikasikan tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yaitu : kesadaran (pemahaman), pemahaman

tentang kebijakan, jenis respons (penerimaan, netralitas, penolakan), atau kekuatan respons.

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dapat dilihat dari gambar berikut :

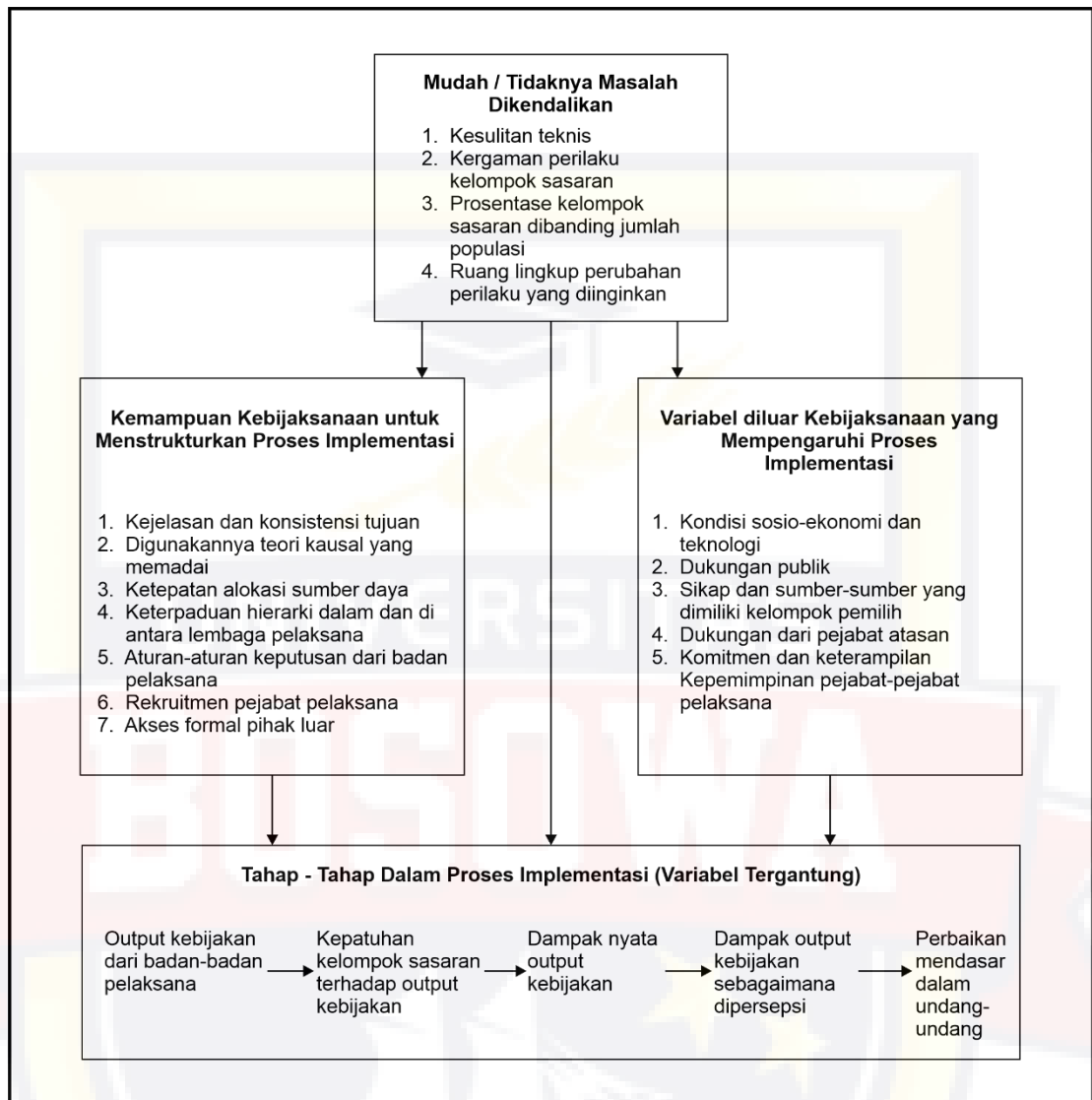


Gambar 1. Teori Van Meter dan Van Horn

Sumber : Van Meter dan Horn (1975) dalam (Subarsono, 2021)

b. Model Implementasi Kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier

Variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi

Sumber : Mazmanian, Daniel A dan Sabatier, Paul A,1983 dalam

(Subarsono, 2021)

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Subarsono, 2021), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*)

- a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan

Sifat masalah itu sendiri mempengaruhi apakah program itu mudah diimplementasikan.

- b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
Implementasi program lebih mudah jika kelompok sasaran homogen.
- c. Proporsi kelompok sasaran terhadap populasi

Pelaksanaan program menjadi lebih sulit jika sasarannya mencakup seluruh penduduk. Sebaliknya, jika jumlah kelompok sasaran tidak terlalu besar, program akan lebih mudah dijalankan.

- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan

Program yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan atau program kognitif lebih mudah diterapkan daripada program yang ditujukan untuk mengubah sikap.

2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*)

- a. Kejelasan isi kebijakan

Semakin jelas dan rinci suatu kebijakan, semakin mudah bagi para pelaksana untuk

memahami dan mengimplementasikannya, karena mereka dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu.

- b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis

Kebijakan yang memiliki landasan teoretis lebih baik karena telah diuji, meskipun harus dimodifikasi untuk beberapa lingkungan social tertentu.

- c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut

Sumber daya keuangan merupakan faktor penting untuk setiap program sosial.

- d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana

Penyebab kegagalan program seringkali adalah kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi terkait.

- e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.

- f. Tingkat Komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

- g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan

Suatu program yang memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi akan lebih mudah memperoleh dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat.

3. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*)

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi

Masyarakat yang terbuka dan terdidik akan lebih mudah menerima program reformasi dibandingkan masyarakat yang tertutup dan tradisional.

2. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan

Kebijakan yang menawarkan insentif biasanya lebih mudah mendapatkan dukungan publik.

3. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*).
4. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor.

c. Model Implementasi Kebijakan dari Hogwood dan Gunn

Menurut Hogwood dan Gunn (Rosmita, 2020) untuk mengimplementasikan kebijakan dengan baik diperlukan syarat-syarat tertentu.

Pertama, adanya jaminan bahwa lembaga pelaksana atau kondisi eksternal yang dihadapi lembaga tidak akan menimbulkan masalah besar.

Kedua, apakah tersedia sumber daya yang memadai untuk mengimplementasikan ini, termasuk sumber daya waktu. Gagasan tersebut relevan karena berkaitan dengan kelayakan implementasi kebijakan. Amandemen UUD 1945 Pasal 34 Ayat (2a) mengamanatkan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk semua.

Ketiga, apakah kombinasi sumber yang diperlukan benar-benar ada. Karena kebijakan publik secara inheren merupakan kebijakan yang multidimensi dan kompleks, maka implementasinya membutuhkan banyak sumber, baik sumber daya aktor maupun sumber.

Keempat, apakah kebijakan yang akan dilaksanakan didasarkan pada kausalitas yang kredibel. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Kelima, apakah ada banyak hubungan sebab akibat. Diasumsikan bahwa semakin sedikit hubungan sebab akibat, semakin besar kemungkinan kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kebijakan dengan hubungan sebab akibat yang

kompleks secara otomatis dapat mengurangi efektivitas penegakan kebijakan.

Keenam, apakah interdependensinya kecil. Asumsinya, jika interdependensinya tinggi, implementasinya tidak akan efektif, apalagi jika relasinya saling bergantung.

Ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan dengan tujuan. Tidak sulit jika orang-orang di kapal yang sama memiliki tujuan yang sama. Namun kapal yang membawa penumpang dengan tujuan yang berbeda dan tidak ada yang memimpin adalah kapal yang tidak pernah meninggalkan tempatnya.

Kedelapan, tugas-tugas dirinci dan ditata dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci implementasi kebijakan yang efektif.

Kesembilan, ada komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah prasyarat untuk kerja tim dan sinergi.

Kesepuluh, partai politik yang berkuasa dapat menuntut dan memperoleh ketaatan sepenuhnya. Kekuasaan merupakan syarat efektifitas implementasi kebijakan, dan sebagai kewenangan yang bersumber dari kekuasaan, kebijakan dipengaruhi oleh pihak sasaran berupa kepatuhan.

d. Model Implementasi kebijakan dari Gogging, Bowman dan Lester

Dikembangkan oleh Goggin, Bowman dan Lester sebuah model komunikasi untuk implementasi kebijakan yang disebut Model Implementasi Kebijakan Generasi Ketiga. Goggin, dkk. bertujuan untuk mengembangkan model pelaksanaan kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengutamakan metodologi penelitian dengan variabel bebas, variabel intervensi, dan variabel terikat, serta menempatkan elemen komunikasi sebagai motor penggerak pelaksanaan kebijakan (Rosmita, 2020).

e. Model implementasi kebijakan dari Edward III

Peneliti akan menggunakan teori dari Edward III dalam penelitian ini. Dalam pandangan Edward III (Subarsono, 2021) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni :

1. Komunikasi

Agar implementasi kebijakan berhasil, pelaksana harus tahu apa yang harus dilakukan. Ini harus mengkomunikasikan kepada kelompok sasaran apa tujuan dan sasaran kebijakan untuk mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun jika pelaksana kekurangan sumber

daya untuk mengimplementasikannya, implementasinya tidak akan efektif.

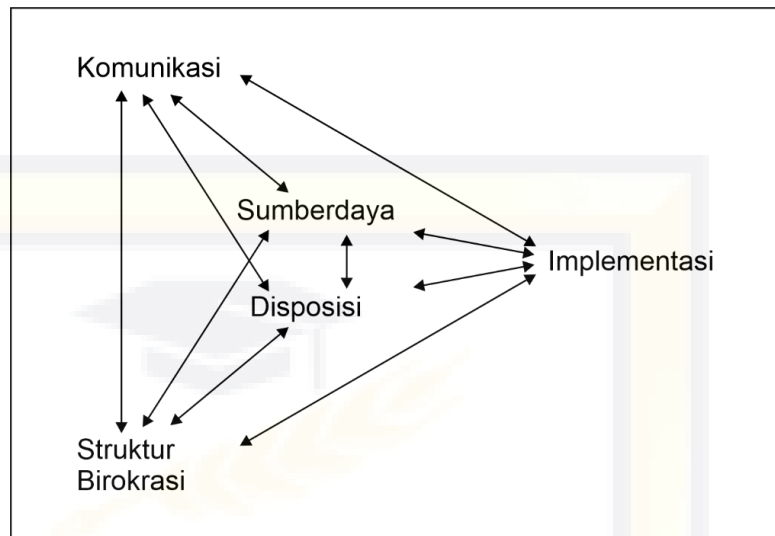
3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan sifat yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Jika pelaksana memiliki kecenderungan yang baik, ia akan dapat mengimplementasikan kebijakan dengan cara yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika pelaksana memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktural terpenting dari organisasi mana pun adalah memiliki prosedur operasi standar (*standard operating procedural* atau SOP). SOP adalah panduan cara untuk setiap tindakan.

Faktor penentu implementasi menurut Edward III dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar 3. Faktor penentu implmentasi menurut Edward III

Sumber : Edwards III (1980) dalam (Subarsono, 2021)

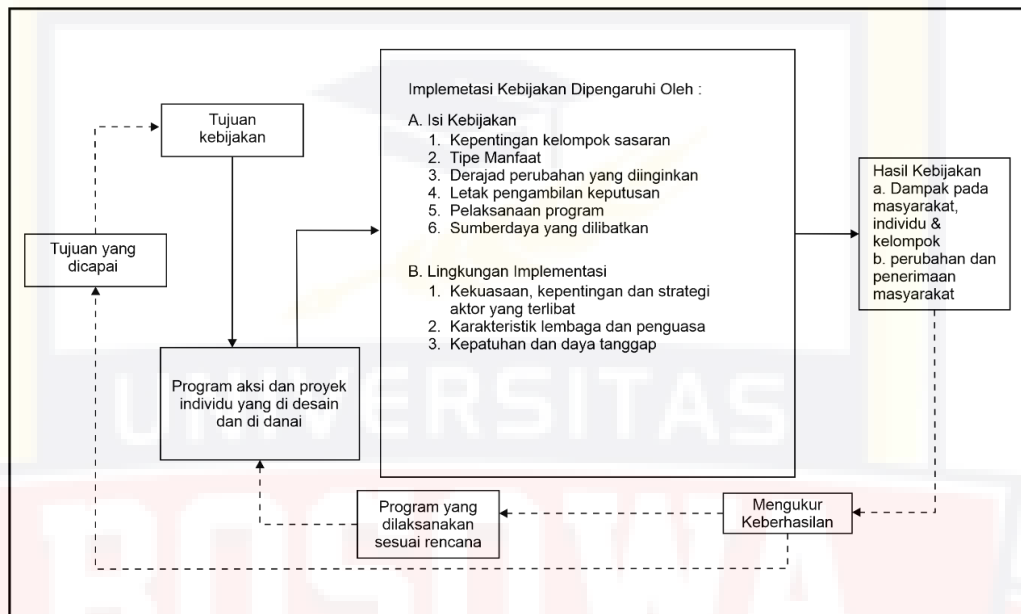
f. Model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle dalam (Subarsono, 2021) keberhasilan implementasi dipengaruhi dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup : (1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran dimasukkan dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima kelompok sasaran; (3) sejauh mana perubahan kebijakan diinginkan; (4) apakah lokasi program sudah benar; (5) apakah kebijakan secara spesifik menyebutkan pelaksana; (6) apakah program didukung oleh sumber daya yang sesuai.

Variabel lingkungan kebijakan meliputi: (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi

dan rezim kekuasaan; (3) tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran; Model implementasi kebijakan Merilee S.

Grindle dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. Implementasi sebagai proses politik dan administrasi

Sumber : Grindle, Merilee S (1980) dalam (Subarsono, 2021)

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Soenarko dalam (Kurniawati, 2018) menyebutkan faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan yaitu:

- Persetujuan, dukungan dan kepercayaan dari orang-orang.
- Isi dan tujuan kebijakan harus dipahami dengan jelas.
- Pelaksana harus memiliki informasi yang cukup, terutama mengenai kondisi dan kesadaran orang-orang yang tunduk pada kebijakan.
- Pembagian kerja yang efektif dalam melakukan kegiatan yang dibedakan secara horizontal dan vertical.

- e. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang sesuai dalam implementasi kebijakan.
- f. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban (*deconcentration*) yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

Soenarko juga menyebutkan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan yaitu:

- a. Teori yang mendasari kebijakan itu salah;
- b. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif;
- c. Sarana tidak boleh digunakan atau tidak digunakan sebagaimana mestinya;
- d. Isi dari kebijakan tersebut tidak jelas;
- e. Ketidakpastian faktor intern dan ekstern;
- f. Kebijakan yang ditetapkan mengandung banyak kekurangan;
- g. Sedikit perhatian diberikan pada masalah teknis dalam implementasi;
- h. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantuan (waktu, uang, sumber daya manusia).

B. Tinjauan Sampah

1. Definisi Sampah

Menurut *World Health Organization* (WHO) (Perangin-angin et al., 2021) Sampah adalah bahan yang tidak terpakai, tidak digunakan, tidak diinginkan atau dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan bukan miliknya sendiri.

Menurut Bebasari dalam (Rosmita, 2020) sampah adalah bahan atau benda yang sudah tidak lagi diperlukan yang harus dibuang pada tempat yang tepat. Sampah jika tidak dikelola dengan baik maka akan mengganggu lingkungan.

2. Jenis-jenis sampah

a. Berdasarkan asal sampah

Menurut Gilbert dkk dalam (Perangin-angin et al., 2021), berdasarkan asalnya sampah padat dapat digolongkan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1. Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan organik yang dapat diuraikan oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Limbah ini dapat dengan mudah terurai melalui proses alami. Sebagian besar sampah rumah tangga adalah bahan organik. Sampah organik antara lain sampah dapur, sisa makanan, pembungkus (kecuali kertas, karet dan plastik), tepung, sayur-sayuran, kulit buah, daun dan ranting.

2. Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan anorganik, baik berupa produk sintetik maupun hasil teknologi pengolahan bahan tambang. Anorganik dibedakan menjadi: limbah logam dan produk olahannya,

limbah plastik, limbah kertas, limbah gelas dan keramik, limbah deterjen. Sebagian besar zat anorganik tidak dapat dicerna oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan.

3. Sampah B3

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau kuantitasnya, secara langsung atau tidak langsung dapat mencemari dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

b. Berdasarkan sifat fisik

Berdasarkan sifat fisiknya sampah terdiri atas :

1. Sampah basah

Kelompok sampah ini merupakan hasil sisa makanan, seperti sayur-sayuran, baik yang diolah di rumah maupun sisa-sisa makanan.

2. Sampah kering

Sampah golongan ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

a. Sampah tidak terurai.

Sampah jenis ini benar-benar tidak dapat terurai secara alami, meski memakan waktu bertahun-tahun, misalnya kaca dan mika.

- b. Sampah tak mudah terurai.

Meskipun sulit terurai, sampah jenis ini akan bisa terurai perlahan-lahan secara alami. Sampah jenis ini masih bisa dipisahkan lagi atas sampah yang mudah terbakar, contohnya seperti kertas dan kayu, dan sampah tak mudah terurai yang tidak bisa terbakar, seperti kaleng dan kawat.

- 3. Berdasarkan dapat dan tidaknya dibakar

- a. Sampah yang mudah terbakar

Sampah yang mudah terbakar, misalnya kertas, karet, kayu, plastik, kain bekas dan sebagainya.

- b. Sampah yang tidak dapat terbakar

Sampah yang tidak dapat terbakar misalnya kaleng-kaleng bekas, besi/logam bekas, pecahan gelas.

3. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan yang melibatkan pengurangan dan pengelolaan sampah. Tujuan pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas

lingkungan serta mengubah sampah menjadi nilai ekonomi (Pratiwi, 2018).

Menurut Ulfarinda dalam (Pratiwi, 2018) ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengurangi sampah, yakni :

1. Mengelompokkan dan memisahkan sampah berdasarkan jenis, jumlah dan sifatnya.
2. Mengumpulkan sampah ke tempat pengolahan sampah terpadu.
3. Mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir.
4. Mengolah sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlahnya.
5. Tahap akhir pemrosesan sampah adalah pengembalian sampah hasil pengolahan ke lingkungan yang aman.

C. Tinjauan Umum Bank Sampah

1. Konsep Bank Sampah

Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering yang dipilah kemudian ditabung dan ditukar dengan uang serta memiliki manajemen layaknya perbankan (Rosmita, 2020).

Menurut permen LH RI No 13 Tahun 2012 Bank Sampah adalah tempat pengumpulan sampah secara selektif yang bernilai ekonomis yang masih dapat didaur ulang atau digunakan kembali. Bank sampah adalah konsep yang mengumpulkan sampah kering yang dipisahkan

dan dikelola seperti bank, tetapi yang disimpan adalah sampah, bukan uang. (Pratiwi, 2018).

Dalam implementasinya, bank sampah dapat mengurangi sebagian besar sampah masyarakat yang berakhir di TPA. Karena masyarakat memilah sampahnya, menukarkan sampahnya ke bank sampah, dan membuang sampah yang tidak masuk ke bank sampah. Ini akan membantu mengurangi jumlah sampah di masyarakat dan TPA. Itu artinya masyarakat bisa melakukan apa yang biasa disebut dengan *reduce* (pengurangan volume) (Pratiwi, 2018).

Konsep yang ditawarkan Bank Sampah ini sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, semua warga harus memisahkan sampah yang dihasilkan dari sumbernya. Sampah yang dianggap tidak berharga dan dibakar oleh warga atau dibuang ke tempat lain dipilah dan disimpan di bank sampah atau diinvestasikan (Rosmita, 2020).

2. Manajemen Bank Sampah

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah adalah sebagai berikut :

1. Pengurangan Sampah

Di Bank Sampah, kami melakukan kegiatan pengurangan sampah dengan menggunakan kembali sampah. Pertimbangan utama dalam daur ulang sampah adalah penggunaan kembali

seluruh atau sebagian sampah menurut fungsi yang sama atau berbeda tanpa melalui proses pengolahan. Daur ulang sampah adalah untuk sampah yang dapat digunakan kembali secara fungsional, seperti sampah plastik, kertas, logam, dan kaca.

2. Penanganan sampah

Pengelola bank sampah perlu memahami kegiatan pembuangan sampahnya masing-masing agar dapat menentukan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan bank sampah yang dikelolanya. Selain itu, dengan memahami pentingnya setiap kegiatan pengolahan sampah, pengelola bank sampah dapat menghitung nilai ekonomi dari potensi sampah yang diolah. Kegiatan pembuangan sampah dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti pemilahan, pengumpulan dan/atau pengolahan.

3. Pengolahan sampah

Pengolahan sampah adalah kegiatan yang mengubah sifat, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Kegiatan ini dilakukan untuk meminimalkan timbulan sampah yang terangkut ke tempat pengolahan sampah akhir, sehingga yang diangkut hanya sisa pengolahan sampah. Pengolahan sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: pengomposan; daur ulang bahan; dan/atau daur ulang energi.

Tata Kelola Bank Sampah dibedakan berdasarkan jenis Bank Sampah, yakni Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit.

Pada dasarnya tata Kelola Bank Sampah baik BSI dan BSU perlu memenuhi unsur:

1. Struktur kelembagaan;
2. Cakupan pelayanan;
3. Nasabah;
4. Standar operasi prosedural (SOP).

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No	Nama dan tahun penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	(Kurniawati, 2018)	Implementasi Program Bank Sampah Malang Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Penerapan Bank Sampah Malang di Kota Malang)	1. Bagaimanakah implementasi program Bank Sampah Malang dalam upaya pemberdayaan masyarakat? 2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya implementasi program Bank Sampah Malang dalam upaya pemberdayaan masyarakat?	Program Bank Sampah Malang berjalan dengan baik serta faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya program ini dapat tertangani dengan baik
2	(Arifin, 2017)	Program Bank Sampah di Kecamatan Batang Sebagai Implementasi	1. Bagaimana program bank sampah di Kecamatan Batang sebagai	Komunikasi yang dilakukan sudah baik, sumberdaya manusia dalam pelaksanaan Bank Sampah di

		Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah	implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dalam perspektif teori George C. Edward III? 2. Seauhmana kontribusi modal sosial dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kecamatan Batang?	Kecamatan Batang masih kurang memadai, komitmen Badan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program Bank Sampah dapat dilihat dari pengadaaan sosialisasi maupun pelatihan, SOP yang digunakan sudah sesuai dengan Permen yang ada. Kontribusi modal sosial dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah dapat dari unsur modal sosial yaitu jaringan, norma dan kepercayaan.
3	(Dongoran et al., 2018)	Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kebersihan dan Bank Sampah	Bagaimanakah implementasi Pengelolaan Bank Sampah Mutiara dalam Menciptakan Kebersihan di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Tahun 2016.	Implementasi kebijakan Peraturan Walikota Medan No. 14 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelayanan Kebersihan Dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Bank Sampah Pada Dinas Kebersihan Kota Medan di Bank Sampah Mutiara Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai terlaksana dengan baik, hanya saja sosialisasi dari pihak pengelola sampah yaitu Bank Sampah Mutiara sendiri masih kurang ke

				masyarakat, sehingga masyarakat masih kurang mengetahui apa manfaat dari pada Bank Sampah itu sendiri. Faktor-faktor yang menjadi kendala yaitu persaingan industri pengelolaan sampah.
4	(Asri & Purnaweni, 2021)	Evaluasi Pelaksanaan Program Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul?	Hanya terdapat 1 faktor yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan program yakni kelembagaan, yang meliputi regulasi dan struktur organisasi. Sementara itu, terdapat tiga faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program, yang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, dan komunikasi.

E. Kerangka Konsep

Pemerintah memiliki peran sentral dalam upaya pengelolaan sampah yang diwujudkan dengan meningkatkan pergerakan sektor dan kegiatan yang dapat mendukung dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di suatu daerah.

Implementasi Kebijakan Bank Sampah merupakan tindakan atau upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA.

Pengelolaan sampah yang komprehensif sangat penting untuk memberikan manfaat ekonomi, kesehatan dan perlindungan lingkungan bagi masyarakat, serta mengubah gaya hidup masyarakat.

Dalam penelitian ini terkait Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar diukur dengan model analisis kebijakan dari model Edward III. Model ini terdiri dari empat variabel yaitu:

1. Komunikasi

Agar implementasi kebijakan berhasil, pelaksana harus tahu apa yang harus dilakukan. Ini harus mengkomunikasikan kepada kelompok sasaran apa tujuan dan sasaran kebijakan untuk mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk mengimplementasikannya, implementasinya tidak akan efektif.

3. Disposisi

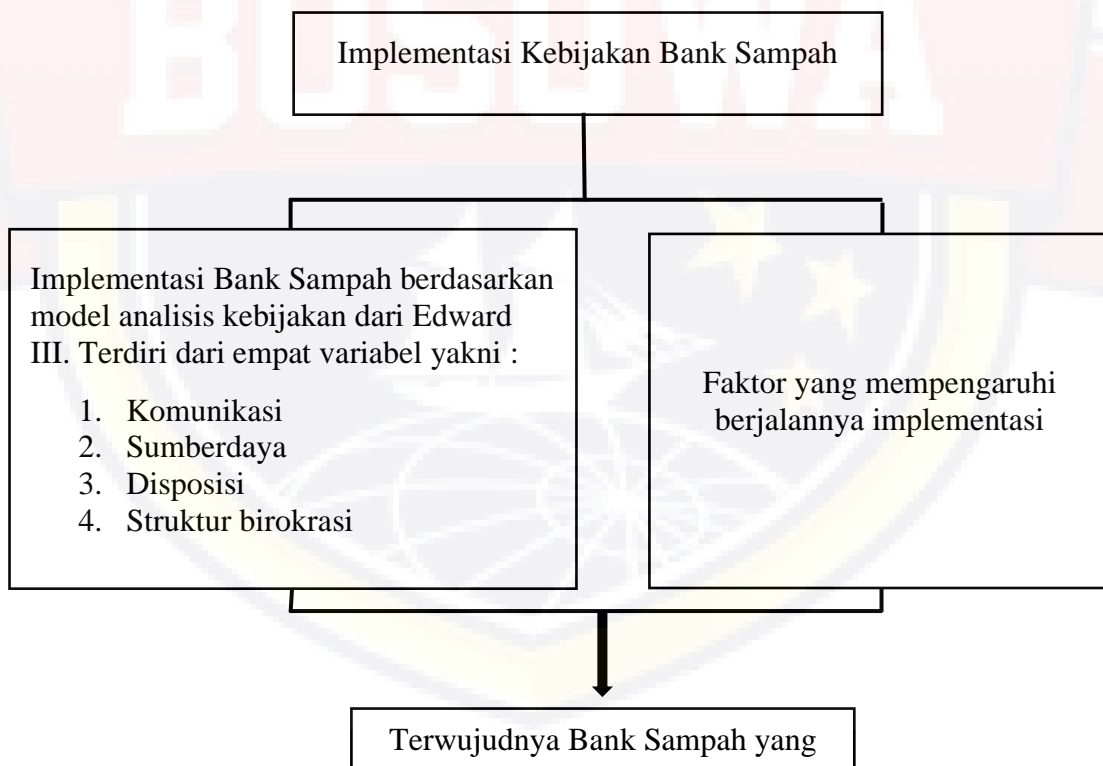
Disposisi adalah watak dan sifat yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Jika pelaksana memiliki kecenderungan yang baik, ia akan dapat mengimplementasikan kebijakan dengan cara yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika pelaksana memiliki sikap atau cara pandang

yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktural terpenting dari organisasi mana pun adalah memiliki prosedur operasi standar (*standard operating procedural* atau SOP). SOP adalah panduan cara untuk setiap tindakan.

Gambar 5. Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif. Menurut Sugiyono dalam (Mustafidah & Suwarsito, 2020) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan peneliti untuk menyelidiki keadaan alamiah, dan peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian ini berbasis data, menggunakan teori-teori yang ada sebagai bahan penjelasan dan menutupnya dengan teori-teori. Tujuan penelitian kualitatif adalah menjelaskan fenomena sedalam mungkin dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perilaku dan kata-kata atau tulisan orang yang dapat diamati. Penelitian kualitatif membutuhkan ketajaman analisis, objektivitas, dan data yang sistematis untuk mencapai akurasi interpretasi. Di sisi lain, desain penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan terbuka terhadap kondisi riil lapangan penelitian.

Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk dapat berusaha mengamati dan mencakup realitas yang terjadi dilapangan dan ingin mengetahui serta melihat langsung secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan program Bank Sampah di kota Makassar

serta apa saja yang menjadi hambatan dalam pengelolaan Bank Sampah Pusat di kota Makassar.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan terkait Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar ini akan dilakukan di Bank Sampah Pusat Kota Makassar yang berada di Kecamatan Panakkukang. Peneliti memilih lokasi ini Bank Sampah Pusat ini karena Bank Sampah Pusat ini membawahi berbagai Bank Sampah Unit yang berada di 15 (lima belas) Kecamatan yang ada di Kota Makassar.

C. Informan Penelitian

Metode penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel secara sengaja atau sengaja memilih seseorang yang dinilai mampu memberikan informasi yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian yaitu tentang Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

Adapun yang akan dijadikan ifnorman dalam penelitian ini adalah :

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Status Informan	Jumlah
1	Veronica A. Tinungki. SP.,Msi	VA	Kepala UPT Bank Sampah Pusat	1
2	Suardi Nurdin, S. Sos	SN	Kepala Tata Usaha Bank Sampah Pusat	1
3	Arfan	AR	Staff pendataan UPTD	1
4	Agus Salim	AS	Petugas Bank Sampah Unit	1
5	Halima	HM	Petugas Bank Sampah Unit	1
6	Yunus	YS	Masyarakat	1
7	Wahidah	WH	Masyarakat	1
8	Dg. Simba	DS	Masyarakat	1
9	Muh. Arsal	MA	Masyarakat	1
10	Rahman Dg. Sija	RS	Masyarakat	1
11	Windi	WD	Motivator	1
Total				11

D. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan sumber informasi berupa orang atau dokumen yang mampu memperkaya dan memantapkan informasi tentang isu-isu yang menjadi pusat perhatian peneliti (Kurniawati, 2018).

Dengan demikian dalam penelitian ini akan dikelompokkan dua jenis data berdasarkan cara memperolehnya, yakni:

1. Data Primer

Data primer adalah data dikumpulkan langsung dari sumber oleh peneliti. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari informan yang berhubungan dengan subjek penelitian melalui proses wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang awalnya dilacak dan dilaporkan oleh seseorang di luar peneliti. Data ini berasal dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik, seperti artikel internet, surat kabar, majalah, makalah kuliah, slide presentasi dari instansi pemerintah dan mitra, dan berbagai dokumen resmi lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan tiga cara antara lain :

1. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong dalam (Pratiwi, 2018) wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua orang: pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan komunikasi langsung, yaitu metode mengajukan pertanyaan terbuka, untuk memastikan informasi yang

diperoleh lebih lengkap, mendalam, dan relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Observasi

Menurut Burhan Bungin dalam (Pratiwi, 2018) Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk merasakan secara langsung aktivitas kehidupan subjek yang diamati dan mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan terhadap subjek yang diamati. Teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung subjek penelitian dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk mempelajari data-data yang diperlukan sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Ketika melakukan metode dokumentasi, peneliti meneliti benda-benda tertulis seperti buku, majalah, buku harian, dll. Metode dokumentasi dapat dilakukan seperti:

- Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya
- *Check-list* yaitu daftar variable yang akan dikumpulkan datanya (Mustafidah & Suwarsito, 2020).

F. Teknik Pengabsahan Data

Menurut Sugiyono dalam (Rosmita, 2020) uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji depenability dan uji

confirmability. Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kredibilitas data yang dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Adapun yang peneliti gunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

G. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dikemukakan oleh Miles dan Hurman (Rosmita, 2020) memiliki tiga langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih yang utama, dan memfokuskan pada yang penting. Reduksi data juga berarti komponen pertama analisis data yang mempersingkat, menyempurnakan, dan membuang apa yang dianggap tidak penting atau tidak relevan dengan fokus penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data berupa kumpulan data dengan uraian singkat. Penyajian data yang umum dalam penelitian kualitatif adalah narasi. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi.

4. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan Kesimpulan. Dalam penelitian mungkin dapat menjelaskan rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada dilapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran umum objek penelitian meliputi gambaran umum Kota Makassar, gambaran umum kecamatan Panakkukang dan gambaran umum UPT Bank Sampah Pusat Kota Makassar. Gambaran umum Kota Makassar yang akan dibahas yaitu kondisi fisik dan wilayah dan jumlah penduduk Kota Makassar. Gambaran umum Kecamatan Panakkukang yaitu luas wilayah dan jumlah penduduk. Adapun gambaran umum UPT Bank Sampah Pusat yaitu kedudukan, tugas dan fungsi serta kepegawaian dari dinas ini.

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi, dahulu bernama Ujung Pandang. Makassar berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur, Kabupaten Gowa disebelah selatan, dan Selat Makassar di sebelah barat. Luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77 Km². Suhu rata-rata di kota Makassar adalah 26°C hingga 29°C, dengan kondisi iklim sedang hingga tropis.

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang. Makassar berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Pangkajene, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan

sebelah Barat adalah Selat Makassar. Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 Km². Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis (K. Makassar, n.d.).

Kota Makassar merupakan kota pesisir yang terbentang sepanjang koridor barat dan utara yang juga dikenal sebagai “*waterfront city*”, dengan beberapa sungai (Tallo, Jeneberang dan Pampang) yang mengalir melewatinya, semuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan daerah dataran rendah yang berada pada ketinggian 0 sampai 25 meter di atas permukaan laut (K. Makassar, n.d.).

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Adapun 15 kecamatan itu adalah Biringkanya, Tamalanrea, Bontoala, Mariso, Mamajang, Makassar, Manggala, Rappocini, Tamalate, Tallo, Ujung Pandang, Panakkukang, Wajo, Ujung Tanah, dan Kepulauan Sangkarrang.(Maharani, 2018)

Berikut merupakan data jumlah penduduk Kota Makasar yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar.

Tabel 3. Jumlah penduduk tahun 2021 menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kota Makassar

Jumlah Penduduk Tahun 2021 Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Di Kota Makassar (jiwa)			
Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Mariso	28.903	28.691	57.594
Mamajang	27.520	28.536	56.056
Tamalate	90.757	90.776	181.533
Rappocini	70.802	73.817	144.619
Makassar	40.699	41.443	82.142
Ujung Pandang	11.895	12.631	24.526
Wajo	15.002	15.031	30.033
Bontoala	27.339	27.763	55.102
Ujung Tanah	17.995	17.952	35.947
Kepulauan Sangkarrang	7.051	7.136	14.187
Tallo	73.289	72.111	145.400
Panakkukang	69.693	69.942	139.635
Manggala	73.649	73.900	147.549
Biringkanaya	104.997	105.079	210.076
Tamalanrea	51.415	51.805	103.220
Jumlah	711.006	716.613	1.427.619

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2021)

2. Gambaran Umum Kecamatan Panakkukang

Kecamatan Panakkukang merupakan salah satu dari 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Kecamatan Panakkukang berbatasan dengan Kecamatan Tallo di sebelah utara, Kecamatan

Tamalanrea di sebelah timur, Kecamatan Rappocini di sebelah selatan dan Kecamatan Makassar di sebelah barat (Vanny, 2021).

Kecamatan Panakkukang terdiri dari 11 kelurahan dengan luas wilayah 17,05 Km². Dalam kurun waktu tahun 2019-2021 jumlah penduduk Kecamatan Panakkukang mengalami pertumbuhan sebesar - 6,73 persen, dimana jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 149.664 jiwa dan pada 2021 yaitu 139.635 jiwa (Vanny, 2021).

Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 69.693 jiwa dan perempuan sebanyak 69.942 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sekitar 100 persen, yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 100 orang penduduk laki-laki (Badan Pusat Statistik, 2021) .

3. Gambaran Umum UPT Bank Sampah Pusat Kota Makassar

Kantor UPT Bank Sampah Pusat yang berada di depan Pasar Toddopuli di Jalan Toddopuli Raya Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar. UPT Bank Sampah Pusat awal mulanya dibentuk berdasarkan Perwali Kota Makassar NO. 63 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 sebagai UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah. Namun telah berubah bentuk menjadi Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah Pusat berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 126 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup.

Pembentukan bank sampah pada awalnya digagas oleh YPN (Yayasan Peduli Negeri) pada tahun 2009 dan diberi nama MGC (Makassar *Green and Clean*). Kemudian pada tahun 2011 berubah nama menjadi Bank Sampah berdasarkan pertimbangan dan kontribusi ide dan pemikiran dari seorang motivator yang berasal dari Kota Surabaya dan peduli dengan keadaan sampah yang menumpuk setiap hari. Dari situlah muncul ide bagaimana mengelola dan memanfaatkan sampah dengan baik sekaligus bermanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan. sehingga terbentuklah bank sampah (Fitria, 2021).

Adapun visi misi dari Bank Sampah Pusat yaitu :

Visi : Mewujudkan kota Makassar yang bersih dan nyaman serta bebas dari masalah sampah.

Misi : Melakukan pengolahan sampah melalui program bank sampah.

Jumlah pegawai yang berada di UPT Bank Sampah Pusat sebagai berikut:

- a. PNS : 9 orang
- b. Tenaga kontrak : 30 orang
- c. Tenaga pengaman : 2 orang

Pegawai di UPT Bank Sampah Pusat terdiri dari Ketua UPT Bank Sampah Pusat, Kepala Tata Usaha, staff administrasi, bendahara, unit penjemputan, unit pemilahan, unit pengembangan, unit pengepakan, unit penjualan dan unit pemeliharaan.

Adapun yang menjadi tujuan dari program Bank Sampah yaitu :

1. Mereduksi sampah Kota Makassar dari permukiman warga.
2. Meningkatkan partisipasi warga dan masyarakat Kota Makassar dalam pengelolaan sampah terkhusus Bank Sampah.
3. Mengurangi biaya operasional pengelolaan sampah.
4. Menjadikan Makassar sebagai kota Bank Sampah.

Adapun mekanisme dari Bank Sampah Pusat yaitu nasabah melakukan penjualan sampah kepada Bank Sampah Unit. Lalu jumlah sampah yang dijual akan dicatat pada buku tabungan nasabah. Uang penjualan dapat langsung diambil ataupun ditabung. Lalu Bank Sampah Unit akan bermohon kepada Bank Sampah Pusat untuk melakukan penjemputan sampah. Lalu petugas Bank Sampah Unit mendatangi Bank Sampah Pusat guna melakukan transaksi hasil penjualan sampah. Sampah-sampah hasil pengangkutan tadi kemudian akan dipilah sesuai dengan jenis-jenisnya. Dan yang terakhir pihak Bank Sampah Pusat akan menghubungi vendor untuk melakukan penjemputan dan penjualan sampah.

Adapun harga sampah yang ditawarkan dapat berubah-ubah sesuai dengan harga pasaran yang ada. Berikut merupakan daftar harga sampah yang ada di Bank Sampah Pusat.

Tabel 4. Daftar harga sampah

No	Kelompok Plastik	Kode	Contoh Barang/ Produk	Harga/Kg (RP)
1	PP gelas bening bersih	P01B	Aqua, club, JS tanpa label	6000
2	PP gelas bening kotor	P01K	Aqua, club, JS dengan label	4300
3	PP gelas warna	P02B	Ale-ale, teh gelas tanpa label dan disusun	3500
4	PP gelas warna kotor	P02K	Aqua, club, teh gelas kotor bercampur	2200
5	PP cincin gelas	P02C	Cincin atau potongan bibir gelas	2500
6	PET bening bersih	P03B	Botol ades tanpa penutup dan label	4900
7	PET biru mudah bersih	P04B	Botol air mineral	4200
8	PET kotor	P04K	Segala jenis PET yang ada label dan penutup	2000
9	PET warna bersih/ pisah	P05B	PET tanpa penutup dan label, warna hijau atau biru	2800
10	PET warna campur	P05C	PET tanpa penutup dan label, warna biru dan hijau campur	2200
11	PET campur	P04C	PET campur tanpa penutup dan label	2900
12	Plastik HD campur	P06	Baskom, gelas, piring tanpa damar	2800
13	HD tutup botol	P06C	Tutup botol campur	3500
14	HD tutup galon	P09K	Tutup galon warna campur	3500
15	Plastik daun	P10	Pembungkus bening campur	2000
16	Plastik HD campur	P13	Kemasan plastik bergaris tengah	3000
17	<i>Refilli, Sachet</i>	P20	<i>Refill</i> minyak goreng, pembungkus <i>sachet</i>	1000
No	Logam	Kode	Contoh Barang/Produk	Harga/Kg (RP)

1	Besi tebal	L01	Besi cor, besi plat	3800
2	Besi tipis	L02	Drum, rak piring	2800
3	Kaleng	L03	Kaleng makanan, kaleng susu, tidak dipress	2400
4	Kuningan	L04	Kuningan piala	40000
5	Tembaga	L05	Tembaga dari kabel	65000
6	Aluminium tebal	L06	Box mesin motor	15000
7	Aluminium tipis	L07	Kaleng minuman, wajan	10000
8	Aluminium siku	L08	Alma dekor	16000
9	Aluminium campuran	L09	Aluminium campuran besi	7000
10	Besi seng	L11	Seng bekas	2000
11	Perunggu	L10	Kran air, kepala regulator gas	7000
No	Kertas	Kode	Contoh barang/Produk	Harga/Kg (RP)
1	Kertas putih	K01	Buku tulis, kertas <i>foto copy</i>	3000
2	Kertas campuran/warna	K02	Majalah, karton warna	1500
3	Kertas buram	K03	Kertas kelabu/buram	2500
4	Kardus (dos)	K04	Karton coklat box	2700
5	Kertas semen A	K05A	Kertas semen Tonasa	2500
6	Kertas mikel	K05B	Kertas pembungkus coklat	2000
7	Koran	K06	Koran	2500
8	Karton rak telur	K07	Rak untuk susun telur	1000
9	Cones	K08	Kertas gulungan	1500
No	Kaca	Kode	Contoh barang/produk	Harga/Kg (RP)
1	Botol markisa bensin	B01	Botol leher panjang bening	2000
2	Botol kecap/bir	B02	Botol leher panjang tebal	1500
3	Botol marjan	B03	Botol tebal	1200
4	Botol soda	B05	Botol tebal	600
5	Botol bir Guinness	B06	Botol tebal	600

Sumber : Bank Sampah Pusat, 2022

B. Analisis Implementasi Program Bank Sampah Pusat di Kecamatan

Panakkukang

Pemerintah Kota Makassar mengimplementasikan program Bank Sampah Pusat dalam bentuk pengelolaan sampah. Praktik pemerintah yang terjadi dalam pengelolaan sampah berbasis implementasi. Alasan dasar tuntutan pengelolaan sampah berwujud dari implementasi adalah karena pengelolaan lingkungan melibatkan organ pemerintah dan non-pemerintah yang bekerja sama, selain itu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menjadi ciri praktik implementasi.

Dengan adanya Bank Sampah, masyarakat sadar bahwa sampah yang diremehkan justru dapat membawa dampak ekonomi bagi masyarakat. Nilai rupiah yang didapat dari penjualan sampah bisa langsung diambil atau ditabung. Pihak-pihak yang terlibat dalam program ini mendapatkan keuntungan baik materil maupun non materiiil.

Merujuk pada konsep implementasi, bahwa implementasi adalah upaya untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan non pemerintah untuk mengelola, menyelenggarakan, dan mengatur segala urusan bersama guna mencapai hasil yang efektif dan efisien. Dari paparan di atas, penelitian ini akan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Bank Sampah dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Menurut George C. Edwards III dalam (Fitria, 2021) memandang implementasi kebijakan yang berperspektif *top-down* menanamkan model implementasi

kebijakan publik dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan ini terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi dalam suatu kebijakan yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Menurut Edward III, untuk menentukan keberhasilan tujuan pelaksanaan kebijakan publik diperlukan komunikasi yang baik. Untuk menghasilkan implementasi yang efektif pengambil keputusan harus mengetahui setiap tugas yang akan mereka lakukan. Pengetahuan tentang tugas mereka akan sangat berguna demi berjalannya implementasi sesuai yang diharapkan. Selain itu, isi kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas kepada sasaran kebijakan.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan informasi oleh kelompok sasaran kebijakan publik. Penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi :

1. Dimensi transmisi menuntut agar proses pendistribusian komunikasi kebijakan publik dijalankan dengan baik dan mengarah pada implementasi yang baik. Dimensi transmisi berharap tidak terjadi kesalahpahaman karena perbedaan jenjang birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi.

2. Dimensi kejelasan menginginkan agar komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan jelas dan tidak membingungkan (ambigu). Informasi mengenai kebijakan dikomunikasikan dengan jelas kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pemangku kepentingan agar dapat mencapai tujuan implementasi secara efektif dan efisien.
3. Dimensi konsisten menginginkan perintah yang diberikan harus dilaksanakan secara konsisten. Perubahan perintah dapat membingungkan pelaksana di lapangan.

Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai Kepala UPT Bank Sampah Pusat mengatakan :

“Untuk kegiatan sosialisasi diberikan wewenang kepada masing-masing kecamatan untuk menghimbau warganya agar turut andil dalam program bank sampah ini. Namun sekarang juga telah ada motivator di tiap kecamatan untuk melakukan sosialisasi rutin kepada warga” (Wawancara VA Jumat 12 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan VA peneliti menyimpulkan bahwa UPT Bank Sampah tidak melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Pihak UPT Bank Sampah memberikan wewenang kepada masing-masing kecamatan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait adanya program Bank Sampah. Selain itu juga ada motivator penggerak Bank Sampah yang ditugaskan pada tiap kecamatan. Hal ini mengakibatkan komunikasi yang terjadi tidak berjalan dengan efektif dikarenakan adanya jenjang birokrasi yang dilewati. Yang mana hal ini sejalan dengan pendapat Edward III dimana

dalam dimensi transmisi diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman karena adanya perbedaan jenjang birokrasi yang dilewati.

Hal serupa juga dikatakan oleh Kepala Tata Usaha :

“Kita ada motivator di 15 kecamatan, jadi tiap kecamatan punya 1 motivator yang bertugas untuk melakukan sosialisasi rutin kepada warga terkait program Bank Sampah. Sebagai pembina pelaksanaan Bank Sampah di tiap Bank Sampah Unit motivator melakukan sosialisasi sekali seminggu” (Wawancara SN Senin 15 Agustus 2022)

Berdasarkan pernyataan SN maka peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi yang dilaksanakan dalam implementasi Bank Sampah dilakukan oleh motivator Bank Sampah yang ada di tiap kecamatan dan dilakukan seminggu sekali. Dimana menurut Edward III diharapkan komunikasi yang dilakukan dalam proses implementasi kebijakan dapat disampaikan kepada kelompok sasaran secara jelas baik itu terkait apa yang menjadi tujuan, sasaran serta substansi yang terkait dalam kebijakan tersebut.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan salah satu petugas Bank Sampah Unit mengatakan:

“Karena itu motivator dari pendamping Dinas Lingkungan Hidup baru, disini baru 3 bulan dia, biasa datang tapi tidak tentu jadwalnya. Datang untuk kontrol dan memberikan motivasi tapi belum pernah sosialisasi tentang sampah di sini tapi kemarin dia telfon ka untuk mengumpulkan 100 orang untuk sosialisasi” (Wawancara HM Senin 22 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan HM maka peneliti mendapatkan gambaran bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh motivator Bank Sampah tidak dilakukan setiap minggu sekali seperti

yang dikatakan oleh SN. Hal ini terjadi karena banyaknya jenjang birokrasi yang harus dilewati menyebabkan terjadi distorsi implementasi. Inilah pentingnya dimensi transmisi dalam komunikasi implementasi seperti yang dikemukakan Edward III.

Salah satu petugas Bank Sampah Unit yang lainnya mengatakan:

“Ada itu motivator di tiap kecamatan yang bertugas memberikan sosialisasi dan motivasi agar semua warga sekitar turut serta dalam Bank Sampah. Tapi tidak tentu jadwal kunjungannya ke sini. Saya juga selaku petugas Bank Sampah Unit selalu mengajak tetanggaku untuk bagaimana caranya mereka tetap mau memilah sampah dan menjualnya ke Bank Sampah. Karena saya sendiri sudah rasakan manfaatnya baik itu uang maupun lingkungan yang menjadi lebih bersih” (Wawancara AS Senin 15 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan AS maka peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh motivator Bank Sampah tidak maksimal. Petugas Bank Sampah Unit juga dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk membantu berjalannya program Bank Sampah ini. Hal serupa juga terjadi di Bank Sampah yang berada di Banda Aceh (Setiawati, Sri, 2018) dimana komunikasi yang terjadi di sana masih tidak optimal dan berdampak pada berkurangnya nasabah Bank Sampah itu sendiri. Dimana menurut Edward III selain komunikasinya dilakukan dengan jelas juga dibutuhkan konsistensi. Konsistensi yang dimaksud yakni isi perintah jangan berubah-ubah serta harus dilakukan terus-menerus.

Selanjutnya hasil wawancara dengan motivator Bank Sampah Kecamatan Panakkukang, yang mengatakan :

“Saya rutin melakukan sosialisasi terkait Bank Sampah maupun tentang pemilahan sampah. Karena di kecamatan Panakkukang itu terdiri dari 11 kelurahan jadi saya harus atur jadwal sebaik mungkin supaya bisa melakukan sosialisasi disemua Bank Sampah Unit yang ada. Biasanya saya juga bekerjasama dengan Yayasan Peduli Negeri dalam memberikan sosialisasi” (Wawancara WD Senin 22 Agustus 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan WD mengindikasikan bahwa pelaksanaan komunikasi oleh motivator yang ditunjuk oleh UPT Bank Sampah tidak maksimal karena wilayah tugas yang diemban luas, sehingga komunikasi yang dilakukan tidak menentu atau konsisten dijalankan. Edward III mengatakan bahwa komunikasi yang dilakukan selain harus jelas juga harus konsisten. Konsisten dalam artian isi perintah atau kebijakan jangan berubah-ubah serta harus dilakukan terus-menerus.

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu warga kecamatan Panakkukang yang merupakan nasabah Bank Sampah, mengatakan :

“Saya sudah 6 tahun ini menjadi nasabah Bank Sampah, yang buat saya tetap bertahan karena setiap kali ada sosialisasi saya pasti hadir. Dan itu membuat pemahaman saya akan sampah semakin bertambah dan saya jadi semangat untuk memilah sampah karena dapat ka juga uang” (Wawancara dengan MA Senin, 15 Agustus 2022)

Berdasarkan pernyataan MA maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan publik. Sosialisasi yang dilakukan berulang-ulang tentunya akan menambah pemahaman masyarakat dan membuat masyarakat tertarik untuk ikut serta dalam program ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward III dimana salah satu sub indikator dalam komunikasi yaitu konsistensi. Konsistensi yang dimaksud yaitu isi kebijakan atau

perintah jangan berubah-ubah sehingga tidak membingungkan serta harus terus-menerus dilakukan agar hasil yang diinginkan dapat tercapai.

Hal serupa dikatakan oleh salah satu warga lainnya yang juga merupakan nasabah Bank Sampah :

“Saya baru sekitar dua tahun jadi nasabah. Awal mulanya tau itu karena diajak ikut sosialisasi sama Pak Agus selaku pengelola Bank Sampah Unit Lamber. Mulai dari situ saya ikut memilah sampah lalu menjualnya. Alhamdulillah karena sampah yang biasanya langsung saya buang sekarang saya bisa dapat uang karena menjual sampah” (Wawancara DS Senin 22 Agustus 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan DS maka disimpulkan bahwa komunikasi memegang peranan penting dalam berjalannya program ini. Masyarakat yang turut serta dalam program ini adalah masyarakat yang sudah pernah mengikuti kegiatan sosialisasi pengolahan sampah. Pernyataan DS sejalan dengan yang dikemukakan oleh Cook & Hunsaker (Syarif¹ et al., 2014) komunikasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi apabila komunikasi dilakukan secara efektif dan efisien. Seorang narasumber lain juga mengatakan :

“Karena penasaran dengan Bank Sampah saya ikut sosialisasinya waktu diadakan pihak kelurahan. Saya sudah tiga tahunan jadi nasabah disini. Pekerjaan harian saya itu sebagai petugas kebersihan. Jadi setiap hari saya pergi menjemput sampah-sampahnya orang terus saya tidak langsung buang. Saya bawa dulu ke rumah untuk dipilih-pilih mana yang bisa dijual baru saya jual ke Bank Sampah” (Wawancara RS Senin 15 Agustus 2022)

Berdasarkan pernyataan di atas mengindikasikan bahwa masyarakat yang menjadi nasabah Bank Sampah awal mula mengetahui

program ini karena adanya sosialisasi yang dilakukan. Begitu pentingnya komunikasi dalam pencapaian implementasi suatu kebijakan, karena dengan adanya komunikasi masyarakat menjadi tahu akan adanya suatu program atau gagasan dari pemerintah yang harus dijalankan oleh masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut dapat dicapai (Ayuningtyas & R, 2018).

Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga lainnya yang mengatakan :

“Saya baru jadi nasabah tahun ini. Awalnya tidak tertarik ka, tapi karena pernah ka ikut penyuluhannya satu kali di kelurahan. Jadi tertarik mi untuk ikut juga. Lumayan tambah-tambah uang belanja” (Wawancara WH Selasa 16 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti mengetahui bahwa konsistensi komunikasi yang dilakukan demi terwujudnya kebijakan yang diinginkan membuahkan hasil yang baik. Karena warga yang mulanya tidak tertarik akhirnya menjadi nasabah Bank Sampah karena mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan. Edward III juga berpendapat demikian, dimana menurut Edward III selain harus jelas, komunikasi yang dilakukan juga harus konsisten baik itu dalam isi kebijakannya maupun dalam penerapannya (Ayuningtyas & R, 2018).

Wawancara dengan warga lainnya yang mengatakan :

“Saya sebenarnya lama mi jadi nasabah tapi sempat tidak aktif. Kemarin ikut ka kegiatan sosialisasinya Ibu Windi jadi akhirnya saya putuskan kembali aktif lagi” (Wawancara YS Selasa 16 Agustus 2022)

Dengan adanya pernyataan dari YS maka peneliti menyimpulkan bahwa tidak mudah untuk mengubah sikap apalagi tentang pengelolaan sampah. Dimana masyarakat lebih terbiasa untuk membuang sampah begitu saja tanpa melalui proses pemilahan terlebih dahulu. Maka sangat penting untuk melakukan pengkomunikasian yang efektif dan efisien. Program Bank Sampah ini harus dijelaskan kepada masyarakat yang menjadi kelompok sarannya mengenai manfaat yang didapatkan, baik itu manfaat bagi lingkungan maupun nilai ekonomi yang didapatkan. Isi kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka secara keseluruhan komunikasi dalam pelaksanaan Bank Sampah sudah terlaksana dengan baik hanya saja pelaksanaannya belum maksimal. Berdasarkan dimensi transmisi komunikasi dilakukan oleh pihak kelurahan dan motivator Bank Sampah karena Bank Sampah hanya memfasilitasi pengelolaan sampah. Dan pihak Bank Sampah sendiri sudah memberikan wewenang kepada setiap kecamatan untuk melakukan sosialisasi kepada warganya. Selain itu juga telah ada motivator pendamping dari Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas melakukan sosialisasi. Jadi dari sisi transmisi komunikasi yang dilakukan harus melalui beberapa jenjang birokrasi hal inilah yang menyebabkan mudahnya terjadinya distorsi implementasi. Dari dimensi kejelasan yaitu informasi yang disampaikan oleh pihak Kecamatan maupun motivator sudah jelas yaitu

tentang apa itu Bank Sampah dan jenis sampah apa saja yang masih bisa di daur ulang dan bisa dijual. Dari dimensi konsisten informasi yang disampaikan selalu sama dan tidak berubah-ubah hanya saja tidak konsisten waktu pelaksanaannya. Komunikasi sangat menentukan berhasil atau tidaknya implementasi suatu kebijakan. Implementasi yang efektif akan terjadi jika komunikasi yang dilakukan sudah efektif dan efisien. Oleh karena itu isi kebijakan harus didistribusikan dengan jelas dan konsisten guna meminimalisir terjadinya distorsi implementasi seperti yang dikemukakan oleh Edward III (Subarsono, 2021). Komunikasi merupakan hal penting dalam implementasi namun komunikasi yang benar-benar sempurna sebetulnya merupakan suatu kondisi yang sulit dilakukan. Namun hal ini bisa diatasi dengan memaksimalkan segala hal yang bisa dilakukan. Tentu, tidak akan ada pemerintah maupun organisasi yang bisa bekerja sempurna. Selalu ada kelemahan, namun demikian harus meminimalisasi kesalahan dari hal-hal yang sesungguhnya bisa diantisipasi sejak dini. Salah satu yang bisa diantisipasi adalah koordinasi komunikasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan alat yang digunakan dalam menentukan keberhasilan kebijakan dalam implementasi. Sumber daya baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai Kepala UPT Mengatakan:

“Dalam meningkatkan program Bank Sampah kami berupaya untuk meningkatkan kualitas pegawai agar tugas yang telah ditetapkan dan diberikan dapat berjalan dengan baik dan terarah sesuai kemampuannya masing-masing” (Wawancara VA Jumat 12 Agustus 2022)

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa VA selaku Kepala UPT Bank Sampah Pusat melakukan upaya peningkatan kualitas pegawai agar setiap pegawai bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

Edward III berpendapat bahwa salah satu indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya membawa pengaruh dalam

implementasi kebijakan yakni staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya (Subarsono, 2021).

Selanjutnya Kepala Tata Usaha Bank Sampah mengatakan :

“Kami disini ada sekitar 41 orang. Tenaga honorer ada 32 orang dan 9 orang ASN. Kami memiliki tugas masing-masing, ada yang bertugas dibagian pencatatan, bendahara, unit penjemputan, unit pemilahan, unit penimbangan, unit pengepakan, unit penjualan, unit pemeliharaan” (Wawancara SN Senin 15 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan SN maka peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya manusia yang ada pada UPT Bank Sampah Pusat sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah pegawai yang bekerja dan terdapatnya pembagian

tugas yang jelas sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Jumlah pegawai yang cukup dan mempunyai keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan tentunya akan mendorong berhasilnya implementasi. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Edward III dalam (Subarsono, 2021) dimana selain harus memadai staf yang ada juga harus kompeten. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Terkait dengan sumber daya peralatan yang dimiliki oleh Bank Sampah, Kepala Tata Usaha mengatakan :

“Disini ada mesin pencacah kaca dan mesin press kertas tapi untuk sementara tidak digunakan karena biaya operasionalnya lebih tinggi dari pada harga jualnya. Andaikan kita langsung menjual ke pabrik mungkin bisa mengurangi tapi kita dibatasi dengan regulasi birokrasi. Sebenarnya kita tidak menjual tapi bagaimana memfasilitasi nilai ekonomis sampah dan tidak ada tumpang tindih harga. Kita menjembatani supaya harga sampah tidak dimainkan dengan tengkulak atau pengepul” (Wawancara SN Senin 15 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan SN dan temuan yang ada di lapangan maka dapat dilihat bahwa UPT Bank Sampah Pusat sudah memiliki alat pencacah kaca dan mesin press kertas. Namun alat ini tidak pernah digunakan. Jadi alat ini dibiarkan terbengkalai begitu saja. Alasan alat ini tidak digunakan yaitu karena besarnya biaya operasional untuk menghidupkan alat ini tidak sebanding dengan harga beli

sampah-sampah yang akan dijual. Namun belum ada mesin pencacah kertas dan juga plastik. Padahal jenis sampah yang ada lebih dominan pada sampah plastik dan kertas. Berbeda dengan pengelolaan Bank Sampah yang ada di Kabupaten Bekasi. Dimana di Kabupaten Bekasi telah tersedia mesin pencacah plastik yang kemudian digunakan untuk membuat berbagai kerajinan. Sampah plastik yang telah terkumpul kemudian dicacah dan dibuat berbagai kerajinan sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi (Hartono et al., 2020).

Selanjutnya salah satu staff Bank Sampah Pusat mengatakan :

“Disini juga ada kendaraan pengangkut sampah. Ada motor viar, mobil box sama mobil truk. Jadi Bank Sampah Unit bisa menelfon atau sms terus tentukan jadwal kapan kita bisa pergi jemput sampahnya” (Wawancara AR Selasa 16 Agustus 2022)

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dilihat bahwa UPT Bank Sampah juga memiliki angkutan pengangkut sampah yang mana hal ini tentunya akan memudahkan pihak Bank Sampah Unit dalam proses penjualan sampah. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil (Pratiwi, 2018).

Selanjutnya salah satu petugas Bank Sampah Unit mengatakan :

“saya merasa terbantu dengan adanya penjemputan sampah. Jadi saya bisa telfon saja terus dijemput mi sampahku” (Wawancara AS 15 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan AS dapat diketahui bahwa fasilitas penjemputan sampah yang dilakukan oleh UPT Bank Sampah Pusat sangat membantu pihak Bank Sampah Unit. Dan tentunya hal ini menjadi salah satu faktor pendorong implementasi kebijakan Bank Sampah tetap berjalan hingga saat ini. Menurut Edward III sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasional implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah maupun semua sarana yang memudahkan dan membantu dalam proses implementasi kebijakan (Setiawati, Sri, 2018). Sehingga berdasarkan pernyataan AS dan teori dari Edward III maka kendaraan penjemputan sampah merupakan sumber daya peralatan pada Bank Sampah Pusat yang membantu mencapai tujuan dari kebijakan program Bank Sampah.

Hal serupa juga dikatakan oleh petugas Bank Sampah Unit lainnya :

“Enaknya menjual sampah di Bank Sampah Pusat karena ada penjemputan sampah. Jadi saya tidak perlu susah-susah bawa sampah ku ke sana” (Wawancara dengan HM Senin 15 Agustus 2022)

Pernyataan HM mengindikasikan bahwa dengan adanya penjemputan sampah pihak Bank Sampah Unit merasa sangat terbantu. Karena dapat mengurangi biaya operasional pengantaran sampah serta tidak semua pihak Bank Sampah Unit memiliki kendaraan untuk mengantar sampahnya ke Bank Sampah Pusat. Sehingga dengan adanya fasilitas penjemputan sampah yang dilakukan oleh pihak UPT Bank

Sampah Pusat sangat membantu berjalannya program ini. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Tanpa sumber daya yang memadai pula suatu implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan (Hartono et al., 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan yang ada di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya peralatan yang ada di Bank Sampah belum maksimal. Karena belum adanya mesin pencacah plastik dan kertas, selain itu mesin pencacah kaca dan mesin press kertas tidak pernah digunakan. Satu-satunya sumber daya peralatan yang sangat membantu yaitu kendaraan pengangkut sampah.

Kesimpulan secara keseluruhan yaitu sumber daya yang tersedia pada Bank Sampah masih belum terlaksana dengan baik. Dari segi sumber daya manusia sudah mumpuni hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah pegawai yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian atau kemampuan yang dibutuhkan. Sedangkan dalam hal sumber daya peralatan masih kurang karena satu-satunya peralatan yang membantu berjalannya kebijakan ini hanya mesin pengangkut sampah. Edward III dalam (Pratiwi, 2018) berpendapat bahwa meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten tapi bila tidak didukung dengan sumber daya yang memadai maka implementasi tidak akan

berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dimaksud yakni sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan. Sumber daya adalah faktor penting demi tercapainya implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas dan menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Salah satu faktor penting dalam berjalannya implementasi adalah disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Terkait hal ini, berikut hasil wawancara dengan salah satu informan Kepala UPT Bank Sampah Pusat :

“Sasaran dari kebijakan ini adalah semua warga. Kami berharap semua warga dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Namun karakteristik tiap orangkan berbeda-beda. Jadi hal ini tidak bisa dipaksakan. Makanya kami selaku petugas dari Bank Sampah Pusat meminta kerjasamanya dengan pihak kecamatan dan kelurahan agar aktif melakukan sosialisasi supaya dapat merubah pola pikir masyarakat” “Wawancara VA Jumat 12 Agustus 2022”

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa yang menjadi sasaran kebijakan Bank Sampah adalah semua warga. Dan untuk mengubah sikap warga yang biasanya langsung membuang sampah tanpa melalui

proses pemilahan tentunya bukan hal yang mudah. Seperti yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2021) program yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan atau program kognitif lebih mudah diterapkan dari pada program yang ditujukan untuk mengubah sikap. Maka dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak demi berhasilnya implementasi kebijakan ini. Hal serupa juga dikatakan oleh Kepala tata usaha :

“Itulah dinamika dalam bermasyarakat, karena tidak semua orang memiliki *mindset* yang sama. Kalau masyarakat kelas atas kan biasanya memang lebih memperhatikan persoalan kebersihan. Yang susah diatur mengenai kebersihan ini biasanya masyarakat menengah dan masyarakat kelas bawah. Terlebih bagi masyarakat yang pindah dari desa ke kota, banyak kami dapati mereka suka buang sampah sembarangan” (Wawancara SN Senin 15 Agustus 2022)

Berdasarkan pernyataan dari SN maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan adalah masyarakat menengah dan kelas ke bawah. Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2021) mengatakan bahwa implementasi kebijakan lebih mudah jika kelompok sasarannya homogen. Sedangkan program Bank Sampah ditujukan bukan hanya untuk golongan-golongan tertentu namun kepada semua masyarakat. Selain kelompok sasarannya homogen, program ini juga ditujukan untuk semua masyarakat tanpa terkecuali. Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2021) pelaksanaan program akan menjadi lebih sulit jika kelompok sasarannya mencakup seluruh penduduk.

Selanjutnya salah satu petugas Bank Sampah Unit mengatakan :

“Saya mempunyai seratusan nasabah tapi yang aktif itu hanya sekitar tiga puluh orang. Jadi saya sudah coba cari tahu ke nasabah ku yang tidak aktif, beberapa dari mereka bilang mereka tidak mau menjual sampah ke saya dengan alasan sampah yang mereka hasilkan hanya sedikit dan walaupun dijual hasilnya tidak seberapa” (Wawancara AS Senin 15 Agustus 2022)

Hasil wawancara dengan AS mengindikasikan bahwa masyarakat beranggapan bahwa sampah yang mereka hasilkan hanya sedikit sehingga tidak perlu dipilah untuk kemudian dijual. Padahal sampah-sampah yang sedikit ini jika dikumpulkan tentunya akan menjadi banyak. Harusnya masyarakat lebih memikirkan manfaat bagi lingkungan jika ikut berpartisipasi dalam kebijakan Bank Sampah, adapun nilai uang yang didapatkan adalah bonus. Edward III dalam (Subarsono, 2021) mengatakan bahwa jika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan akan menjadi tidak efektif. Hasil wawancara dengan petugas Bank Sampah Unit yang lain :

“Saya punya nasabah sebanyak 250 orang namun yang aktif hanya seratusan. Rata-rata yang tidak aktif itu karena gengsi, mereka tidak mau dikatai pemulung. Padahalkan sampah yang dijual itu sampah hasil rumah tangga sendiri” (Wawancara HM Senin 22 Agustus 2022)

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa dengan menjual sampah kepada Bank Sampah itu sama saja dengan pemulung. Hal inilah yang mempengaruhi proses berjalannya implementasi kebijakan program Bank Sampah sesuai yang dikatakan Edward III dalam (Subarsono, 2021) yakni disposisi merupakan kemauan ataupun keinginan dari para

pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan dapat dicapai. Kemudian peneliti mewawancarai motivator Bank Sampah di Kecamatan Panakkukang :

“Sikap para warga tentunya berbeda. Itulah mengapa selalu diupayakan kegiatan sosialisasi dilakukan agar pola pikir warga pelan-pelan bisa berubah” (Wawancara WD 22 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan WD maka dapat dilihat bahwa sosialisasi perlu dilakukan secara konsisten agar bisa merubah pola pikir warga. Dalam (Pratiwi, 2018) Van meter dan Van Horn mengidentifikasi unsur yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan yakni : kesadaran, pemahaman tentang kebijakan dan jenis respons (penerimaan, netralitas, penolakan). Dalam hal ini pentingnya memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait dengan kebijakan Bank Sampah serta manfaat yang bisa didapatkan agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terkait dengan pengolahan sampah rumah tangga sehingga dapat berpartisipasi ataupun menabung sampahnya di Bank Sampah Unit terdekat. Selanjutnya salah satu warga mengatakan :

“Saya sudah lama jadi nasabah disini tapi sempat tidak aktif. Alasan saya waktu itu tidak aktif karena malas memilah sampah untuk ditimbang. Sampah di rumah ku juga tidak seberapa. Tapi karena sudah beberapa kali ikut sosialisasi saya jadi terbuka pikirannya untuk kembali aktif” (Wawancara YS Selasa 16 Agustus 2022)

Pernyataan YS mengindikasikan bahwa karakter dari para implementor sangat berpengaruh dalam berjalannya kebijakan. Edward III dalam (Subarsono, 2021) jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Selanjutnya salah satu warga juga mengatakan :

“Saya juga kadang-kadang malas untuk sortir sampah ku. Karena saya juga sudah tua jadi lebih gampang kalau langsung dibuang saja sampahku. Tapi karena ini sampah bisa dijual jadi biasanya saya sempatkan untuk pilih-pilih sampahku, saya juga minta ke tetangga sebelah rumah kalau ada sampah plastiknya bisa dipisah nanti biar saya yang jual karena lumayan untuk tambah-tambah uang belanja” (wawancara RS Selasa 16 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan disposisi atau karakter dari para warga sangat berpengaruh dalam proses berjalannya implementasi program Bank Sampah. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn, yang mana dalam (Subarsono, 2021) Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yakni : (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauan implementor untuk melaksanakan suatu kebijakan; (b) kognisi yaitu pemahaman implementor terkait dengan kebijakan; (c) intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Kesimpulan secara keseluruhan terkait disposisi adalah karakteristik atau watak setiap masyarakat tentu beragam. Dan disposisi memang peranan penting dalam proses implementasi kebijakan sesuai dengan yang dikatakan oleh Edward III dalam (Subarsono, 2021) yaitu apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan agar menjadi tidak efektif. Mazmanian dan Sabatier dalam (Subarsono, 2021) juga mengatakan bahwa program yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan akan lebih mudah diterapkan dari pada program yang ditujukan untuk mengubah sikap. Oleh karena itu peran dari pihak Bank Sampah maupun pihak kelurahan diperlukan untuk terus mengedukasi masyarakat akan pentingnya memilah sampah agar tidak semua sampah berakhir di TPA karena masih ada sampah-sampah yang memiliki nilai ekonomis. Dengan selalu melakukan sosialisasi maka perlahan-lahan itu akan membuat sikap ataupun perspektif warga terkait sampah akan berubah.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard*

operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Bank Sampah Induk harus memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan Bank Sampah, paling sedikit :

- a. Jam operasional BSI;
- b. Jadwal dan mekanisme pengumpulan sampah; dan
- c. Pencatatan jenis dan volume sampah yang dilakukan pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan kembali dan/ atau pengolahan.

Sehubungan dengan hal ini peneliti kemudian mewawancarai Kepala UPT Bank Sampah, yang mengatakan :

“Kami disini bekerja sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Dan SOP yang ada disini sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku” (Wawancara VA Jumat 12 Agustus 2022)

Pernyataan diatas mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan Bank Sampah pusat terdapat struktur organisasi dan ada SOP yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan adanya jam kerja yang diterapkan pada Bank Sampah

Pusat yaitu hari senin hingga sabtu dari pukul 08.00 hingga pukul 17.00.

Selain itu juga terdapat jadwal dan mekanisme pengumpulan sampah serta adanya pencatatan jenis dan volume sampah yang dijual kepada

Bank Sampah Pusat. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Hal serupa juga dikatakan oleh Kepala Tata Usaha :

“Kami disini bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Tentunya SOP yang ditetapkan disini sesuai dengan peraturan yang ada” (Wawancara SN Senin 15 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa SOP yang ada pada Bank Sampah sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Edward III dalam (Subarsono, 2021) mengatakan bahwa struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek penting terkait struktur organisasi yakni adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP ini akan menjadi acuan bagi implementor dalam bertindak. SOP yang diterapkan Bank Sampah Pusat sudah sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, yaitu adanya jam kerja, adanya jadwal pejemputan dan mekanisme pengumpulan sampah, selain itu juga ada pencatatan jumlah dan volume sampah. Namun peneliti menemukan bahwa pencatatan yang dilakukan masih dengan pencatatan di buku sedangkan sekarang adalah zaman penggunaan teknologi yang tentunya akan lebih memudahkan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dengan konsep 3R *Reduce*, *Reuce*, dan *Recycle*

berbasis masyarakat. Lalu pemerintah bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, Kementerian Lingkungan hidup mengeluarkan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan 3R Reduce, *Reuce*, dan *Recycle* berbasis masyarakat melalui Bank Sampah. Untuk mewujudkan hal diatas Kementerian menghimbau Walikota termasuk Walikota Makassar untuk membetuk Bank Sampah maka dikeluarkanlah Peraturan Walikota Nomor 63 tahun 2014 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja UPTD pengelolaan daur ulang sampah. Lalu dibentuklah UPT Bank Sampah Pusat yang merupakan unit pelaksana teknis Bank Sampah dibawah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar (Rosmita, 2020).

Berikut SOP atau mekanisme penyetoran sampah yang ditetapkan oleh Bank Sampah Pusat :

1. Nasabah melakukan pemilahan jenis sampah di rumah (di sumber). Nasabah melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya seperti botol minuman, kardus dll.
2. Kemudian sampah yang sudah dipilah dibawa ke Bank Sampah Unit.
3. Pengurus kemudian menimbang sampah yang dibawa oleh nasabah.

4. Pengurus Bank Sampah Unit kemudian mencatat jumlah sampah dan harga belinya. Nasabah bisa menabung uang hasil penjualan sampah atau langsung mengambilnya.
5. Pengurus melakukan pemilahan dan pengepakan sampah. Sampah-sampah dari nasabah kemudian dipilah kembali oleh petugas Bank Sampah Unit lalu kemudian di masukkan dalam karung.
6. Setelah itu pengurus Bank Sampah Unit kemudian menghubungi Bank Sampah Pusat untuk menjemput sampah serta melakukan pembelian.

Adapun mekanisme penimbangan sampah di Bank Sampah Pusat sebagai berikut :

1. Bank Sampah Unit, Bank Sampah Sektoral, Bank Sampah Sekolah maupun Instansi/Lembaga bermohon kepada Bank Sampah Pusat melalui SMS agar sampah dijemput.
2. Kemudian Bank Sampah Pusat mengutus tenaga penjemput sampah untuk mengambil sampah dan menimbanginya.
3. Pengurus Bank Sampah datang ke Bank Sampah Pusat untuk transaksi hasil penimbangan sampah.
4. Sampah yang telah diangkut kemudian dibawa ke area pemilah/gudang untuk kemudian dilakukan pemilahan atau pembersihan jenis sampah (plastik, logam, kertas, dan kaca) jika diperlukan lalu kemudian dikemas.

5. Bank Sampah Pusat kemudian menghubungi vendor untuk melakukan penjemputan/penjualan sampah.

Kesimpulan secara keseluruhan terkait struktur birokrasi yang ada pada Bank Sampah sudah baik. Karena SOP yang berlaku sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Mekanisme dalam penimbangan yang ada baik itu di Bank Sampah Pusat maupun Bank Sampah Unit sudah jelas.

Kesimpulan secara keseluruhan terkait dengan implementasi kebijakan Bank Sampah di Kecamatan Panakkukang yaitu :

- a. Komunikasi yang dilakukan oleh Bank Sampah Pusat Kota Makassar sudah baik dalam dimensi kejelasan, namun dalam dimensi transmisi masih kurang yaitu dengan banyaknya jenjang birokrasi yang dilalui mengakibatkan mudahnya terjadi distorsi implementasi. Terkait dengan dimensi konsisten, informasi yang disampaikan selalu sama dan tidak berubah-ubah hanya saja tidak konsisten waktu pelaksanaannya.
- b. Sumber daya manusia sudah mumpuni hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah pegawai yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian atau kemampuan yang dibutuhkan. Sedangkan dalam hal sumber daya peralatan masih kurang karena satu-satunya peralatan yang membantu berjalannya kebijakan ini hanya mesin pengangkut sampah.

c. Disposisi yakni karakteristik atau watak setiap masyarakat tentu beragam. Dan disposisi memegang peranan penting dalam proses implementasi kebijakan.

d. Struktur birokrasi yang ada pada Bank Sampah sudah baik. Karena SOP yang berlaku sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Mekanisme dalam penimbangan yang ada baik itu di Bank Sampah Pusat maupun Bank Sampah Unit sudah jelas.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Berjalannya Implementasi Kebijakan Bank Sampah di Kecamatan Panakkukang

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan Bank Sampah di Kecamatan Panakkukang, yaitu :

1. Rendahnya harga penjualan sampah

Harga sampah yang ditawarkan kepada warga lebih rendah dibandingkan harga yang ada di tengkulak hal inilah yang membuat beberapa warga lebih tertarik untuk menjual kepada tengkulak. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara salah satu petugas Bank Sampah Unit yang mengatakan :

“Disini yang jadi nasabah itu orang-orang rumahan ji. Kalau pemulung itu langsung jual ke pengepul karena harga disana lebih tinggi. Saya disini kasih harga dibawahnya harga yang na kasih Bank Sampah Pusat karena disitu mi keuntunganku” (Wawancara AS 15 Agustus 2022)

Dari hasil wawancara dengan AS maka mengindikasikan bahwa harga yang ditawarkan oleh Bank Sampah Pusat lebih rendah

dibandingkan harga yang ditawarkan oleh para tengkulak. Mazmanian dan Sabatier dalam (Subarsono, 2021) mengatakan bahwa kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Karena harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan tengkulak akibatnya beberapa masyarakat lebih memilih menjual sampahnya kepada para tengkulak. Hal serupa juga dikatakan oleh Kepala Tata Usaha Bank Sampah yang mengatakan:

“Sebenarnya kendala disini itu dalam harga nilai jual ke vendor atau perusahaan. Kadangkala nilai jualnya naik turun mengikuti harga pasar. Kan sistemnya itu warga menjual ke BSU kemudian dari BSU ke Bank Sampah Pusat baru kemudian kami melempar ke vendor atau pabrikan”
“Wawancara SN Senin 15 Agustus 2022)

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa harga beli yang ditawarkan lebih murah karena banyaknya jenjang penjualan yang harus dilalui. Salah satu tujuan dari program Bank Sampah ini yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat, namun faktanya harga yang ditawarkan cenderung berubah-ubah serta lebih rendah dari pada yang ditawarkan oleh tengkulak. Hal inilah yang mengakibatkan banyak warga yang tidak aktif karena lebih memilih untuk menjual sampahnya kepada tengkulak.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksudkan yaitu yang ada pada Bank Sampah Pusat dan Bank Sampah Unit. Dimana pada Bank Sampah Pusat itu hanya berukuran 300 m² yang mana ini merupakan kantor sekaligus tempat pemilahan sampah.

Area pemilahan yang ada pada Bank Sampah Pusat berada pada area terbuka. Dimana semua sampah yang sudah dipilah kemudian ditumpuk untuk menunggu transaksi penjualan kepada vendor/pabrik. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil (Pratiwi, 2018).

Area pemilahan Bank Sampah Unit berada di pekarangan rumah. Sampah-sampah yang telah dibeli ini kemudian akan dipilah kembali oleh petugas Bank Sampah Unit. Jadi pengelola Bank Sampah Unit memanfaatkan pekarangan rumah untuk menjadi tempat pengelolaan sampah-sampah yang telah dibeli dari masyarakat.

3. Kurangnya koordinasi antar Lembaga pemerintahan yang berkaitan
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pihak Bank Sampah memberikan wewenang kepada kecamatan untuk sosialisasi kepada warga masing-masing kelurahan terkait program Bank Sampah. Karena program Bank Sampah sendiri masuk dalam sembilan program pokok kecamatan. Yang artinya tiap kecamatan harus punya Bank Sampah Unit di dalamnya. Namun dalam prakteknya sosialisasi yang dilakukan tidak mempunyai jadwal khusus. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak warga yang tidak mengetahui akan adanya program ini. Seperti saat peneliti sedang mencari lokasi Bank Sampah Unit. Masih ada

beberapa warga yang tidak mengetahui bahwa di kelurahan bahkan di lorong yang mereka tinggali ada Bank Sampah Unit. Harusnya setiap bulan dilakukan evaluasi oleh Bank Sampah kepada pihak kecamatan maupun kelurahan untuk meninjau apakah sudah dilakukan sosialisasi dalam satu bulan atau belum. Kalaupun pihak kelurahan tidak menguasai materi tentang program ini seharusnya mereka bekerjasama dengan pihak Bank Sampah.

UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil penelitian terkait analisis implementasi kebijakan Bank Sampah di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dalam perspektif teori Edward III dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - e. Komunikasi yang dilakukan oleh Bank Sampah Pusat Kota Makassar sudah baik dalam dimensi kejelasan, namun dalam dimensi transmisi masih kurang yaitu dengan banyaknya jenjang birokrasi yang dilalui mengakibatkan mudahnya terjadi distorsi implementasi. Terkait dengan dimensi konsisten, informasi yang disampaikan selalu sama dan tidak berubah-ubah hanya saja tidak konsisten waktu pelaksanaannya.
 - f. Sumber daya manusia sudah mumpuni hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah pegawai yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian atau kemampuan yang dibutuhkan. Sedangkan dalam hal sumber daya peralatan masih kurang karena satu-satunya peralatan yang membantu berjalannya kebijakan ini hanya mesin pengangkut sampah.
 - g. Disposisi yakni karakteristik atau watak setiap masyarakat tentu beragam. Dan disposisi memegang peranan penting dalam proses implementasi kebijakan.

- h. Struktur birokrasi yang ada pada Bank Sampah sudah baik. Karena SOP yang berlaku sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

Mekanisme dalam penimbangan yang ada baik itu di Bank Sampah Pusat maupun Bank Sampah Unit sudah jelas.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan Bank Sampah yaitu rendahnya harga penjualan sampah, terbatasnya sarana dan prasarana dan kurangnya koordinasi antar Lembaga pemerintahan yang berkaitan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka peneliti memiliki saran yaitu :

1. Harusnya setiap petugas Bank Sampah Unit juga diberikan wewenang untuk senantiasa melakukan sosialisasi tentang program ini, bisa dimulai dengan mengajak orang-orang terdekat terlebih dahulu. Selain itu harusnya dibuatkan jadwal untuk kegiatan sosialisasi.
2. Perlunya koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* agar keterbatasan penyediaan sarana prasarana dapat teratasi.
3. Harusnya pihak Bank Sampah Pusat jangan hanya berfokus pada penjualan saja. Alat yang ada harusnya bisa dimanfaatkan sehingga sampah-sampah yang ada bisa di daur ulang untuk kemudian dibuat kerajinan.
4. Hendaknya dibuat suatu kebijakan atau regulasi untuk mendukung pengelolaan sampah. Hingga masyarakat lebih patuh dalam mengelola sampah rumah tangga.

5. Sebaiknya pencatatan jumlah sampah maupun nasabah Bank Sampah menggunakan teknologi yaitu bisa berbasis web atau menggunakan aplikasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, J. (2017). Program Bank Sampah di Kecamatan Batang Sebagai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. In *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Asri, N. W. S., & Purnaweni, H. (2021). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bank Sampah Di Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang*.
- Ayuningtyas, R. H., & R, A. Z. (2018). Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Implementasi Kampung Tematik di Kelurahan Rejomulyo. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Badan Pusat Statistik, K. M. (2021). *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Makassar (Jiwa), 2019-2021*. <https://makassarkota.bps.go.id/indicator/12/72/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-makassar.html>
- Dongoran, H. S., Harahap, R. H., & Tarigan, U. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kebersihan dan Bank Sampah. *Administrasi Public*.
- Fatmawati, A., Muhsin, M. A., & Taufik, A. (2019). Kinerja Pelayanan Bank Sampah Kota Makassar. *Jurnal Inovasi Dan Pelayanan Publik Makassar*, 1(18), 1–15.
- Fitria, K. (2021). *Implementasi Program Reuse, Reduce, dan Recycle (3R) Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Pelita Harapan Kelurahan Ballaparang Kecamatan Rappocini Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hartono, Widiasih, S., & Ismowati, M. (2020). Analisis Inovasi Bank Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perkotaan Di Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. *Reformasi Administrasi*, 7(1), 41–49.
- Hermansyah. (2021). *Evaluasi Kinerja Bank Sampah Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Krishnawan, B. R., & Tuswoyo. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Dalam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Merah Delima Rw 006 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara. *Ilmu Administrasi Publik*, 2, 11. file:///D:/Downloads/2918-7830-1-SM.pdf

Kurniawati, F. (2018). *Implementasi Program Bank Sampah Malang Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Universitas Brawijaya.

Maharani, I. (2018). *Ada 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan di Kota Makassar, Ini Pembagiannya*. <https://makassar.tribunnews.com/2018/11/07/tribunwiki-ada-15-kecamatan-dan-153-kelurahan-di-kota-makassar-ini-pembagiannya?page=2>.

Makassar, B. P. S. K. (2020). *Hasil Sensus Penduduk*. <https://makassarkota.bps.go.id/indicator/12/72/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-makassar.html>

Makassar, K. (n.d.). *Geografis*. <https://makassarkota.go.id/geografis-2/>

Merdeka. (2021, November 1). *Pemkot Makassar Siapkan Mesin Pengolah Sampah Berbasis Energi*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/pemkot-makassar-siapkan-mesin-pengolah-sampah-berbasis-energi.html>

Mustafidah, H., & Suwarsito. (2020). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (T. Haryanto (ed.)). UM Purwokerto Press.

Perangin-angin, R. W. E., Lismawati, & Pasaribu, Y. A. (2021). *Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi)* (kodri (ed.); 1st ed.). Penerbit Adab.

Perkotaan, P. P. K. (2017). *Profil Kota Makassar*. <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/kota-otonom/70/>

Pratiwi, D. (2018). Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan. *Universitas Sumatera Utara*, 44–80.

Rosmita. (2020). *Implementasi Program Bank Sampah Pusat di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Setiawati, Sri, R. A. (2018). Implementasi Program Bank Sampah. In *Lentera Akuntansi*.

- SIPSN. (2020). *Data Pengelolaan Sampah & RTH*.
<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbangan>
- Sore, U. B., & Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik* (Dahlan (ed.); 1st ed.). CV Sah Media.
- Statistik, B. P. (2020). *Hasil Sensus Penduduk*.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html/>
- Subarsono, A. (2021). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi* (Dimaswids (ed.); X). Pustaka Pelajar.
- Syarif¹, A., Unde², A. A., & Asrul³, L. (2014). The Importance Of Communication And Information In The Implementation of Disaster Management Policy In Makassar City. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 3(3), 142–152.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/583>
- Vanny, G. (2021). *Kecamatan Panakkukang Dalam Angka*.

Lampiran 1. Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

I. Judul Penelitian:

Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis implementasi program Bank Sampah di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan Bank Sampah di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar?

III. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui analisis implementasi pada program Bank Sampah di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan Bank Sampah di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

IV. Fokus Penelitian

1. Analisis implementasi kebijakan bank Sampah di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.
2. Faktor yang mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan Bank Sampah di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

V. Informan penelitian

1. Pemerintah:
 - a. Kepala UPT Bank Sampah Pusat = 1 orang
 - b. Kepala Tata Usaha Bank Sampah Pusat = 1 orang
 - c. Staff Pendataan UPTD = 1 orang
2. Masyarakat :
 - a. Petugas Bank Sampah Unit = 2 orang
 - b. Masyarakat Kecamatan Panakkukang = 5 orang
 - c. Motivator Bank Sampah = 1 orang

TABEL 5. MATRIKS UNTUK PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN

No	Rumusan masalah	Fokus Penelitian	Indikator Penelitian	Prediktor Penelitian	Sumber Informan	Teknik Pengumpulan Data
1	Bagaimana analisis implementasi kebijakan Bank Sampah di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar?	Analisis implementasi kebijakan Bank Sampah di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar	1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Struktur birokrasi	1. Terjadinya sosialisasi oleh UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah tentang adanya kebijakan Bank Sampah. 2. Adanya sumber daya yang tersedia guna mendukung berjalannya kebijakan Bank Sampah. 3. Sikap para masyarakat yang menjadi implementor. 4. SOP yang ditetapkan oleh UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah	1. Kepala UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah 2. Staff Pendataan UPTD 3. Camat Panakkukang 4. Petugas Bank Sampah Unit 5. Masyarakat Kecamatan Panakkukang 6. Motivator Bank Sampah	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi
2	Faktor apa yang mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan Bank Sampah di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar	Faktor yang mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan Bank Sampah di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar		Faktor yang mempengaruhi berjalannya implementasi	1. Kepala UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah 2. Staff Pendataan UPTD 3. Petugas Bank Sampah Unit 4. Masyarakat Kecamatan Panakkukang	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi

Lampiran 2: Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Pedoman Wawancara I

**Bagi Pelaksana Bank Sampah Pusat
(UPT Bank Sampah Pusat Kota Makassar)**

1. Sejak kapan program Bank Sampah Pusat dilakukan ?
2. Apa visi dan misi Bank Sampah Pusat Kota Makassar?
3. Apa yang menjadi tujuan dari dibentuknya Bank Sampah Pusat?
4. Apakah semua warga bisa menjadi nasabah Bank Sampah?
5. Siapakah yang menjadi kelompok sasaran dari program Bank Sampah?
6. Apakah selalu diadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Bank Sampah?
7. Fasilitas apa saja yang dimiliki oleh Bank Sampah Pusat Kota Makassar?
8. Berapa jumlah pegawai di Bank Sampah Pusat?
9. Bagaimana mekanisme penyetoran sampah dan pembayaran yang ada di Bank Sampah Pusat?
10. Apakah ada SOP yang ditetapkan oleh Bank Sampah Pusat?
11. Bagaimana sikap warga yang menjadi nasabah Bank Sampah Pusat?
12. Apakah terjadi kendala dalam pelaksanaan Bank Sampah Pusat?
13. Layanan apa saja yang diberikan oleh Bank Sampah Pusat?

Lampiran 3: Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Pedoman Wawancara II
Bagi Petugas Bank Sampah Unit

1. Sejak kapan menjadi petugas Bank Sampah Unit?
2. Mengapa tertarik untuk menjadi petugas Bank Sampah Unit?
3. Berdasarkan informasi darimana sehingga mengetahui adanya program Bank Sampah?
4. Apakah ada peningkatan pendapatan bagi masyarakat dengan adanya Bank Sampah Pusat ini?
5. Apakah selalu diadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Bank Sampah?
6. Bagaimana mekanisme penyetoran sampah dan pembayaran yang ada di Bank Sampah Pusat?
7. Apakah terjadi kendala dalam pelaksanaan Bank Sampah Pusat?
8. Layanan apa saja yang diberikan oleh Bank Sampah Pusat?
9. Apakah ada saran yang ingin diberikan terkait program Bank Sampah Pusat?

Lampiran 4: Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Pedoman Wawancara III

Bagi Sasaran Program Bank Sampah Pusat

(Masyarakat yang menjadi nasabah Bank Sampah)

1. Sejak kapan menjadi nasabah Bank Sampah?
2. Berdasarkan informasi darimana sehingga mengetahui adanya program Bank Sampah?
3. Apakah ada peningkatan pendapatan bagi masyarakat dengan adanya Bank Sampah Pusat ini?
4. Apakah selalu diadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Bank Sampah?
5. Bagaimana mekanisme penyetoran sampah dan pembayaran yang ada di Bank Sampah?
6. Apakah terjadi kendala dalam pelaksanaan Bank Sampah?
7. Layanan apa saja yang diberikan oleh Bank Sampah Pusat?
8. Apakah ada saran yang ingin diberikan terkait program Bank Sampah?

Lampiran 5. Panduan Observasi

Panduan Observasi

- 1. Observasi umum lokasi penelitian**
 - a. Profil umum Bank Sampah Pusat Kota Makassar
- 2. Kinerja implementasi kebijakan Bank Sampah di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar**
 - a. Komunikasi
 - b. Sumberdaya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur Birokrasi
- 3. Faktor apa yang mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan Bank Sampah di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar**
 - a. Faktor yang mempengaruhi berjalannya Bank Sampah Pusat

BOSOWA

Lampiran 6. Gambar-gambar Penelitian



Gambar 6. UPT Bank Sampah Pusat
Sumber : Dokumentasi Peneliti

NO	TANGGAL	JENIS	KG	DEBET	KREDIT	SALDO	PARAF
		Botol	4		Rp 2.000	Rp 590.700	
	12/3	DC	30		Rp 45.000	Rp 635.700	
	12/4	Rak	7		Rp 3500	Rp 639.200	
	12/5	PC	14		Rp 21.000	Rp 660.200	
	8/7	PC	3		Rp 4500	Rp 664.700	
		Doe	11		Rp 16.500	Rp 681.200	
		Rak	5		Rp 2.500	Rp 683.700	
					Rp 15.000	Rp 698.700	
					Rp 2.000	Rp 700.700	

NO	TANGGAL	JENIS	KG	DEBET	KREDIT	SALDO	PARAF

Gambar 7. Buku Tabungan Nasabah
 Sumber : Dokumentasi Peneliti



Gambar 8. Petugas Bank Sampah Unit sedang melakukan pemilahan
Sumber : Dokumentasi Peneliti



Gambar 9. Mesin pencacah kaca

Sumber : Dokumentasi peneliti



Gambar 10. Mesin press kertas

Sumber : Dokumentasi peneliti



Gambar 11. Kendaraan pengangkut sampah

Sumber : Dokumentasi peneliti



Gambar 12. Penjemputan sampah oleh petugas Bank Sampah Unit
Sumber : Dokumentasi Peneliti

MEKANISME PENIMBANGAN SAMPAH DI BANK SAMPAH UNIT (BSU) KOTA MAKASSAR



1. Nasabah Melakukan Pemilahan Jenis Sampah di Rumah (di sumber)



2. Nasabah Membawa Sampahnya ke Bank Sampah Unit (BSU)



3. Pengurus Menimbang Sampah dari Nasabah (Kg)



4. Pengurus Mencatat Hasil Penimbangan Nasabah (Kg/Rp)



5. Pengurus Melakukan Pemilahan dan Pengepakan Sampah

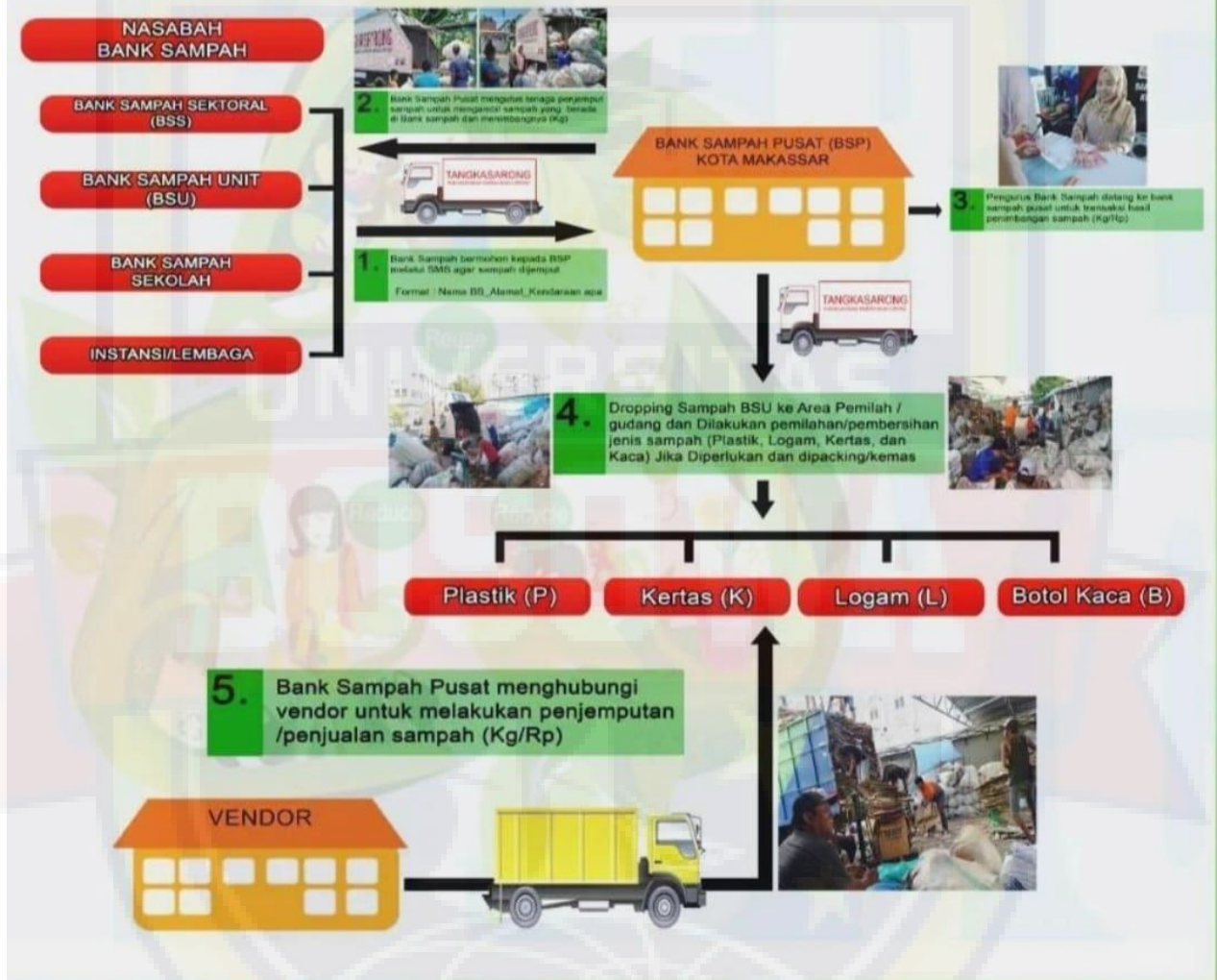


6. Penjemputan dan Pembelian Sampah oleh Bank Sampah Pusat

Gambar 13. Mekanisme Penimbangan Sampah di BSU

Sumber : Dokumentasi Peneliti

MEKANISME PENIMBANGAN SAMPAH DI BANK SAMPAH PUSAT (BSP) KOTA MAKASSAR



Gambar 14. Mekanisme Penimbangan Sampah di Bank Sampah

Sumber : Dokumentasi Peneliti



Gambar 15. Tempat pemilahan sampah di BSP

Sumber : Dokumentasi Peneliti



Gambar 16. Tempat Pemilahan Sampah di BSU

Sumber : Dokumentasi peneliti



Gambar 17. Tempat pemilahan sampah di BSU

Sumber : Dokumentasi Peneliti